



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI X DPR RI DENGAN MENTERI PEMUDA DAN
OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 11 November 2021
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X Gedung Nusantara I DPR RI (secara Fisik dan Virtual)
Ketua Rapat	: Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP. / Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Acara	1. Laporan Pelaksanaan PON XX dan Perkembangan Peparnas XVI. 2. Pembahasan Sanksi <i>World Anti-Doping Agency</i> (WADA).
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI)
Hadir	: Pimpinan: 1. H. SYAIFUL HUDA 2. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M. 3. Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP. 4. Dr. DEDE YUSUF M.E, S.T., M.I.Pol. 5. Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.
	Anggota: Fraksi PDI Perjuangan 6. dr. SOFYAN TAN 7. PUTRA NABABAN (I) 8. MY ESTI WIJAYATI (I) 9. PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP. (I) 10. Dr. AHMAD BASARAH (I) 11. M. GURUH IRIANTO SUKARNO PUTRA (I) 12. RANO KARNO, S.IP. (I) 13. Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA 14. Dra. ADRIANA CHARLOTTE DONDOKAMBAY, M.Si. 15. VANDA SARUNDAJANG (I)

Fraksi Partai GOLKAR

16. FERDIANSYAH, S.E., M.M. (I)
17. Dr. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H.
18. H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI (I)
19. DR. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si.
20. ADRIAN JOPIE PARUNTU
21. ROBERT JOPPY KARDINAL, SAB.

Fraksi Partai GERINDRA

22. ALI ZAMRONI, S.Sos. (I)
23. Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN
24. Hj. HIMMATUL ALIYAH, S.Sos., M.Si. (I)
25. Ir. H. NUROJI (I)
26. MARTINA, S.I.Kom., M.Si. (I)
27. H. MUHAMMAD NUR
28. ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si. (

Fraksi Partai NASDEM

29. RATIH MEGASARI SINGKARU, M.Sc. (I)
30. RIAN FIRMANSYAH, S.Pd. (I)
31. LESTARI MOERDIJAT (I)
32. M. SYAMSUL LUTHFI, S.E.
33. Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. (I)

Fraksi PKB

34. Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H. (I)
35. Drs. H. BISRI ROMLY, M.M.
36. MUH. HASSANUDIN WAHID (I)
37. H. AN'IM FALACHUDDIN MAHRUS
38. Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si. (I)

Fraksi Partai DEMOKRAT

39. A. S. SUKAWIJAYA ALIAS YOYOK
SUKAWI
40. Ir. BRAMANTYO SUWONDO, M.M.
41. DEBBY KURNIAWAN, S.Kom. (I)
42. ANITA JACOBA GAH, S.E. (I)

Fraksi PKS

43. Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si.,
M.Psi.T. (I)
44. H. MUSTAFA KAMAL, S.S.
45. Dr. H. FAHMI ALAYDROES, M.M., M.Ed. (I)
46. Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag. (I)

Fraksi PAN

47. Hj. DEWI CORYATI, M.Si.
48. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi. (I)
49. Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.
50. MITRA FAKHRUDDIN MB.

Fraksi PPP

- 51. Hj. ILLIZA SAADUDIN DJAMAL, S.E. (I)
- 52. ROJIH (I)

Pemerintah

- 1. Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si. (Menteri Pemuda dan Olahraga RI)
- 2. Dr. JONNI MARDIZAL, M.M. (Plt. Sekretaris Menteri Kemenpora RI)
- 3. Dr. RADEN ISNANTA, M.Pd. (Deputi 3 Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI)
- 4. Drs. GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO, M.B.A. (Tenaga Ahli Menteri Kemenpora RI)
- 5. FARIDA ISMIYATI (Tenaga Ahli Menteri Kemenpora RI)
- 6. SRI WAHYUNI, S.T., M.Sc. (Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenpora RI)
- 7. Drs. SANUSI, M.H. (Kepala Biro Humas dan Hukum)
- 8. Dr. SURONO, S.Pd., M.Pd. (Asdep Olahraga Prestasi)
- 9. RAJA SAPTA OKTOHARI (Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia)
- 10. dr. MUSTHOFA FAUZI (Ketua Umum LADI)
- 11. dr. RHEZA MAULANA SYAHPUTRA., B.Med.Sc. (Hons), M.M., MARS. (Wakil Ketua Umum LADI)
- 12. drg. DESSY ROSMELITA (Sekjen LADI)
- 13. Beserta Jajajaran

KETUA RAPAT / F-P GOLKAR (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP.):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kita semua banggakan dan hormati Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bang Zainudin Amali beserta seluruh jajaran baik yang hadir di ruangan ini maupun saya lihat lengkap juga hadir melalui virtual.

Hadir juga di sini Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sekarang sibuk ini mendampingi Panja Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional ya.

Walaupun Pak Gatot masih tetap setia ya Pak Gatot sebagai tenaga ahli menteri. Terima kasih.

Juga Pak Raden Isnanta selaku Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga. Mungkin ada Ibu Farida ya yang selalu mendampingi dan menjembatani Ibu Sri Wahyuni.

Pak Menteri bagus Pak Menteri pokoknya kalau ada putri-putrinya itu menambah semangat kita rapat.

Juga tentunya ada Pak Sanusi, Pak Surono juga hadir.

Yang kita tunggu-tunggu juga ini umum Komite Olahraga Indonesia Raja Sapta Oktohari.

Bang Okto yang juga adalah Ketua Tim Akselerasi dan Investigasi untuk penyelesaian sanksi WADA. Kelihatannya ada titik cerah ini soalnya wajahnya nampak. Ya? Komite Olimpiade. Ya, ya mohon maaf.

Kemudian juga Pak Musthofa Fauzi hadir kembali dan nanti katanya langsung ke Papua ini. Sekarang mengawalinya selalu ketat ini. Ketua Lembaga Anti-Doping Indonesia.

Juga mungkin datang Dokter Rheza? Hadir ya? Oh ya terima kasih. Kalau Dokter Dessy?

SEKJEN LADI (drg. DESSY ROSMELITA):

Hadir Ibu, sudah di Papua.

KETUA RAPAT:

Wow tapi ada di virtual juga ya. Terima kasih. Baiklah.

Tentunya kepada Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi X yang hadir.

Teman-teman media hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan kita semua kita masih bisa hadir dalam Rapat Kerja dengan Menpora dan juga KOI ya ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari pandemi dan saat ini

sekretariat melaporkan bahwa sudah 8 fraksi hadir dan dengan demikian kita sudah memenuhi tata tertib DPR untuk melakukan Raker dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* perkenankan saya membuka rapat kerja hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL WIB)

Karena jaraknya agak jauh, izin dibuka.

Baiklah kembali ke agenda. Agenda rapat kerja kita hari ini adalah laporan pelaksanaan PON XX Papua dan juga perkembangan Peparnas XVI di Papua dan agenda kedua terkait dengan perkembangan ya pembahasan menyangkut sanksi WADA. Walaupun ini sudah kita bahas lumayan Pak Menteri cukup dalam tapi tentu saja di sini ada Bang Okto ya jadi nanti mudah-mudahan ada perkembangan terbaru lagi yang bisa didengar oleh kita semuanya. Apakah disetujui agendanya terbatas kepada dua hal tersebut?

(RAPAT: SETUJU)

Izinkan dari meja pimpinan pertamanya tentu kami ingin ucapkan selamat ya dan apresiasi atas terselenggaranya PON XX Tahun 2021 di Papua. PON yang digelar dari akhir September hingga pertengahan November 2021 ini telah menunjukkan berbagai kesuksesan baik dalam hal penyelenggaraan, prestasi, maupun sukses ekonomi masyarakat. Mudah-mudahan nanti tentunya Saudara Menteri bisa menjelaskan dengan lebih detail walaupun kita laksanakan PON ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 memang ada yang terpapar nah ini bagaimana perkembangannya saat ini mudah-mudahan mereka semua sudah sehat.

Secara keseluruhan PON sudah berlangsung lancar, tertib, aman. Secara prestasi kita juga mendengar beberapa rekor nasional sudah dipecahkan oleh para olahragawan kita dan dalam sukses ekonominya kita juga mendengar pertumbuhan ekonomi Papua juga terdongkrak ya melalui penyelenggaraan PON ini. Mudah-mudahan sukses-sukses ini juga nanti diikuti oleh sukses-sukses lainnya termasuk pemanfaatan sarana-prasarana *pasca event*.

Nah setelah PON kita juga menanti kesuksesan penyelenggaraan *event* yang tidak kalah penting yaitu Pekan Paralimpiade Nasional atau Peparnas Papua yang digelar 5-13 November 2021 ini. Penyelenggaraan Peparnas sangat penting bagi pembinaan atlet difabel dalam meningkatkan prestasi di berbagai ajang kompetisi. Karena mereka juga memiliki posisi yang setara dan membawa nama Indonesia kita bertanding di level internasional. Hal ini paling tidak telah ditunjukkan dari prestasi di Paralympic Games 2020 yang ternyata lebih baik daripada Olimpiade 2020 di Tokyo yang lalu.

Oleh karena itu kami menganggap sangat penting ya untuk mendengarkan dari Saudara Menteri penyelenggaraan PON dan Peparnas ini seperti apa begitu ya dan tentunya publik juga ingin mengetahui lebih

mendalam untuk bisa bersama-sama mungkin kita juga bergembira ya dengan hasil-hasil yang dicapai dan tentunya memang kita juga merasakan gempita sukses PON dan Peparnas di Papua memang agak terganggu ya dengan tidak diizinkan nya bendera merah putih berkibar di *ceremony* kemenangan Tim Thomas Cup akibat sanksi WADA. Oleh sebab itu kami juga terus siap mendalami dan ingin mendapatkan penjelasan langsung dari Saudara Menteri dan juga tentunya dari ketua tim akselerasi dan investigasi penyelesaian sanksi ini mudah-mudahan ya kita bisa segera keluar atau terbebas dari sanksi WADA.

Demikian Bapak/Ibu agenda rapat kerja kita hari ini. Nah sebelum kita mendengarkan paparan dari Menpora kita perlu kesepakatan dahulu waktunya begitu ya karena memang ini hanya ada dua agenda ya dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pada pukul 16.00 WIB maksimal ya? Setuju ya? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

Baiklah kita persilakan kepada Saudara Menpora Republik Indonesia untuk menyampaikan paparannya dan setelah itu mungkin bisa dilengkapi nanti oleh ketua tim akselerasi dan investigasi penyelesaian sanksi WADA. Terima kasih. Silakan.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Baik terima kasih Ibu Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore.

Salam sejahtera buat kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Komisi DPR RI baik Ibu Ketua yang hadir memimpin secara langsung maupun para pimpinan hadir secara virtual. Bapak dan Ibu Anggota Komisi X yang terhormat yang hadir secara fisik maupun secara virtual.

Temannya dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ketua.

Juga Ketua Umum NOC Indonesia, Pak Raja Sapta Oktohari.

Kemudian juga Ketua Umum Lembaga Anti-Doping Indonesia, Bapak Dokter Musthofa Fauzi beserta pengurus lainnya.

Serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama terima kasih Ibu Ketua atas undangan rapat kerja pada siang hari ini dan sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena tadinya Raker yang diagendakan tanggal 3 November saya tidak mungkinkan hadir karena sedang berada di Papua mempersiapkan pembukaan Peparnas dan sebenarnya posisi saya ini sekarang Ibu Ketua masih di Papua. Cuma karena ada undangan Raker dan nanti dini hari saya akan kembali lagi ke

Papua. Jadi supaya tidak mengecewakan Komisi X sudah diundang sekali lalu saya datang lagi kembali.

Ibu Ketua dan Bapak/Ibu Anggota Komisi X yang terhormat.

Dari apa yang disampaikan oleh Komisi X DPR RI kepada kami laporan tentang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON XX di Papua dan sekaligus perkembangan tentang Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) XVI yang sekarang ini masih sedang berlangsung di Papua. Untuk itu izinkan kami menyampaikan secara garis besar saja Ibu Ketua karena laporan secara keseluruhan belum bisa kami sampaikan karena hal-hal yang menyangkut administrasi sekarang masih sedang dalam pengerjaan.

Tetapi sebagaimana sudah ditekankan oleh panitia penyelenggara pada saat mengawali pekerjaan besar ini PON ini harus sukses. Kategori sukses adalah sukses dalam empat kategori minimal. Sukses penyelenggaraan, kemudian sukses secara prestasi, sukses ekonomi dan sukses administrasi. Karena sekarang sedang pandemi maka kami juga tambahkan harus sukses pengendalian COVID-19.

Ibu Ketua dan Bapak/Ibu Anggota yang terhormat.

Sebelum pelaksanaan PON memang banyak keraguan kekhawatiran bahkan banyak ketakutan yang juga disampaikan oleh berbagai kalangan agar PON ini ditunda bahkan ditiadakan bahkan ada permintaan di pindah tempatnya. Tetapi Bapak Presiden Pak Joko Widodo sudah bertekad karena kita sudah memutuskan penundaannya dari 2020 ke 2021 dan tempatnya di Papua maka arahan kepada kami dan menteri-menteri kabinet lainnya untuk tetap berjalan.

Ini PON yang sampai menerbitkan tiga kali Inpres kalau tidak salah ini. Inpres untuk dukungan penyelenggaraan ini dan menteri-menteri itu juga datang ke sana untuk memastikan pelaksanaannya. Empat Menko Ibu Ketua datang langsung hadir secara bergantian sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian kami dan menteri-menteri terkait lainnya yang ada dalam Inpres itu turun langsung memastikan sesuai dengan bidang tugas pekerjaannya masing-masing.

Nah itulah sebagai pelajaran buat kita bahwa kalau sinergitas ini bisa dilakukan lintas kementerian kemudian komunikasi yang baik dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota ini bisa berjalan. Seberat apa pun pekerjaan, di awal-awal semua orang takut tentang pelaksanaan ini tapi *alhamdulillah* bisa diselesaikan pekerjaan tentang Pekan Olahraga Nasional XX ini.

Empat sukses yang disampaikan tadi, sukses penyelenggaraan sebagaimana yang kita ketahui dan juga ada kekhawatiran-kekhawatiran bahwa ini tidak akan terselenggara dengan baik, faktor keamanan, faktor jarak yang jauh, kemudian faktor SDM dan berbagai hal-hal yang tadinya menjadi kekhawatiran maka itu *alhamdulillah* bisa teratasi dengan baik. Ini

bisa kami sampaikan terbukti tidak ada satu pun pertandingan yang berhenti akibat penyelenggaraan yang tidak baik.

Di sana sini ada kekurangan pasti, bukan hanya di Papua saja. Di tempat-tempat lain pun pada saat pelanggaran PON-PON sebelumnya tetap muncul berbagai masalah. Tetapi kami menilai itu bukan satu hal yang signifikan yang mengganggu kelancaran jalannya PON. Oleh karena itu PON tetap bisa berhasil, tetap bisa berjalan sehingga kami menyimpulkan dari sisi penyelenggaraan PON ini sukses.

Kemudian sukses yang kedua adalah sukses prestasi. Hampir semua kita bahkan termasuk diri saya sendiri Ibu Ketua, saya tidak membayangkan bahwa akan ada pemecahan rekor saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah persiapan dari kontingen di seluruh daerah yang tidak maksimal, saya di awal-awal memperkirakan PON ini akan berjalan tetapi tidak akan ada pemecahan rekor. Tetapi di dalam pelaksanaannya terbukti ada 90 rekor yang terpecahkan yakni 56 rekor PON dan 34 rekor nasional, *alhamdulillah*.

Bahkan banyak bibit-bibit talenta-talenta muda yang muncul saat Pekan Olahraga ini sehingga kita harapkan PON ini juga menjadi bagian dari pembina kita untuk mencari bibit-bibit atau talenta-talenta yang kita dorong untuk mengisi posisi-posisi di tingkat elite atlet nasional. Sebagai contoh Ibu Ketua saya berikan gambaran ada satu anak yang usianya masih 15 tahun, dia memperoleh tiga emas. Jadi umur usia 15 tahun SMP kira-kira begitu sekolahnya tapi dia bisa memperoleh tiga emas. Artinya PON ini juga sukses untuk pembibitan dan dan talenta sehingga sukses prestasi yang dicanangkan secara nasional maupun oleh tuan rumah itu juga tercapai.

Yang selanjutnya adalah sukses ekonomi, ini juga luar biasa Ibu Ketua. Dengan datangnya sekitar 30 ribu orang di Papua yang tadinya kita tidak menyangka karena orang takut dengan situasi keamanan dan lain sebagainya ternyata dari jumlah yang ada kurang lebih yang tercatat memang sekitar 12 ribu ya kontingen resmi, tetapi yang berada di sana dari itu sampai diperkirakan hampir 30 ribu dan menurut catatan dari Bank Indonesia kira-kira sebanyak 1,5 triliun ya, serta UMKM juga bergairah di dalam perputaran ekonomi selama pelaksanaan PON, mungkin lebih dari itu dalam catatan-catatan kita.

Ada satu Ibu Ketua, satu cerita yang saya alami sendiri karena saya harus berpindah dari setiap *venue-venue* yang lain yang jaraknya juga lumayan jauh sehingga suatu saat saya tidak mungkin untuk mampir lagi ke hotel untuk makan siang. Saya makanlah di warung, warung yang dekat salah satu *venue*. Apa yang mereka sampaikan? Karena mereka tahu saya menteri mereka sampaikan "Pak Menteri PON terus, PON terus". Terus itu bagaimana? Ya sepanjang tahun ada PON. Saya bayangkan, saya tanya kenapa? Penghasilannya empat kali lipat dari yang biasa-biasa sebelum ada PON.

Bagaimana hunian-hunian karena akomodasi hotel yang juga terbatas sehingga penduduk di sekitar *venue*, di sekitar akomodasi-akomodasi resmi juga menyewakan rumahnya. Saya sempat tanya karena sebagian dari kami juga harus menyewa akomodasi di rumah-rumah penduduk kira-kira kalau ukuran Jakarta Ibu Ketua itu setara dengan kita kontrak 1 bulan di Tebet itu. Jadi ya lumayan, jadi inilah dampak ekonomi terhadap pelaksanaan PON sehingga kami sampaikan ini termasuk sukses ekonomi.

Kemudian sukses administrasi. Nah ini belum bisa saya sampaikan karena prosesnya masih jalan karena kita tidak mau di akhir dari PON ini ada masalah. Masalah administrasi, masalah pertanggungjawaban bahkan berdampak pada masalah hukum. Ini yang kita jaga betul sehingga pada saat kami diminta untuk menyalurkan biaya bantuan dari pusat kepada pemerintah daerah atau kepada PB PON saya minta didampingi langsung oleh pihak kepolisian dan kejaksaan dan setiap penanda tangan langsung bahkan BPKP pun mendampingi di sana, teman-teman dari Kementerian Keuangan perwakilan di Papua juga kita jaga sedemikian rupa supaya tidak ada peluang penyimpangan dari dana-dana PON ini. Ini belum bisa saya bisa laporkan Ibu Ketua karena kita masih menunggu hasil berikutnya.

Selanjutnya tentang COVID-19 walaupun ini awalnya tidak dimaksudkan untuk menjadi sukses tetapi saya perlu laporkan di dalam forum Rapat Kerja Komisi X yang terhormat ini. Orang memperkirakan bahwa nanti ada klaster PON pada saat itu artinya akan banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Tapi ternyata data yang kami terima sampai dengan akhir ya itu ada 178 orang dan itu terdiri dari atlet, pelatih, kemudian ada beberapa panitia dan teman-teman dari media dan *alhamdulillah* ini sekarang tidak ada lagi masalah.

Karena seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kalau atlet jika terpapar paling *recovery*-nya 4-5 hari sudah, itu sudah paling lama itu bahkan ada yang 3 hari sudah. Karena memang mereka punya kebugaran yang bagus tetapi mungkin pada saat itu mereka sedang capek, sedang lelah, habis bertanding dan lain sebagainya. Ini Ibu Ketua sampai dengan saat ini penanganan dari Kementerian Kesehatan, kemudian satgas COVID-19 dari BNPB bersinergi dengan pemerintah daerah dan semuanya tertangani dengan baik.

Ada satu tantangan yang cukup besar dan berat menurut saya Ibu Ketua yakni begitu kita mengumumkan penonton 25%. Nah kenyataannya itu tidak bisa terkendali 25% Ibu Ketua karena kalau dia tidak kita izinkan dia akan berkumpul di luar itu makin tidak terdeteksi. Kalau di dalam stadion, di dalam *venue* mereka masih bisa kita minta untuk memakai masker, menjaga jarak dan lain sebagainya walaupun itu tidak gampang, tidak mudah.

Tapi *alhamdulillah* terutama pada saat cabang-cabang olahraga yang diikuti oleh tuan rumah dan cabang-cabang olahraga yang sangat diminati seperti sepak bola itu sudah sulit kita mengendalikan. Tetapi fakta menunjukkan laporan dari apa yang kami terima bahwa terpaparnya seperti ini bila dibandingkan dengan begitu puluhan ribu orang yang ada di sana

tetapi dengan jumlah 178 data yang kami pegang saya kira ini mudah-mudahan bisa mengindikasikan bahwa COVID-19 terkendali. PON ini menjadi pelajaran buat kita untuk melaksanakan *multi event* atau *single event* lainnya setelah ini. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehingga kalau ada hal-hal yang perlu kita koreksi, kita lihat perbaikan-perbaikan tentu itu akan kita lakukan.

Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang Peparnas yang sekarang masih berlangsung Ibu Ketua. Jadi Peparnas ini diikuti oleh 12 cabang olahraga jadi tidak sebanyak waktu PON, PON 37. Kemudian tempat pelaksanaannya juga itu hanya ada di dua tempat yakni Kota dan Kabupaten Jayapura. Karena ini diikuti oleh atlet-atlet disabilitas, atlet difabel sehingga walaupun jumlahnya sedikit, tidak terlalu banyak seperti PON tetapi sensitivitasnya lebih tinggi.

Jadi pelayanan kepada mereka juga harus benar-benar baik dan sehingga tidak memunculkan rasa kita tidak memberikan posisi yang setara kepada mereka. Ini yang menjaga secara teknik dan menjaga perasaan Ibu Ketua. Ini yang tidak mudah dan diperkirakan yang ada di sana itu dari jumlah yang di awal kira-kira sekitar 3.500 baik itu atlet, baik itu pelatih dan tenaga pendamping. Karena ini atlet Paralympic maka dibutuhkan ada tenaga pendamping, berbeda dengan atlet-atlet yang non disabilitas mereka hanya cukup dengan pelatih, *official* dan (suara tidak jelas) tetapi ini harus ada tenaga pendamping.

Memang masalah-masalah yang muncul adalah bagaimana kita mempersiapkan berbagai hal yang harus disesuaikan dengan kondisi dari atlet disabilitas. Kita bersyukur bahwa *venue-venue* yang digunakan itu adalah sudah dirancang ramah difabel. Jadi sudah dipersiapkan ramah difabel sehingga tidak begitu banyak kesulitan. Demikian juga di akomodasi ya memang ada beberapa yang harus kita lengkapi terutama hotel harus untuk tempat kursi roda dan lain sebagainya, itu *alhamdulillah* teratasi. Ketika kami di awal-awal berada di sana memang muncul masalah karena melayani yang non disabilitas sama yang disabilitas sekali lagi saya katakan ini berbeda. Sedikit tapi lebih dibutuhkan kita harus lebih telaten, kita lebih harus mengerti perasaan dan lain sebagainya.

Ibu Ketua, sekarang ini sedang berlangsung dan dia akan berakhir pada tanggal 13 dan mudah-mudahan sukses yang sudah tunjukkan oleh PON ini juga bisa menular kepada Peparnas. Bahkan kemarin saya sudah mendapatkan laporan ada juga pemecahan rekor oleh atlet disabilitas ini, pembukaannya dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden dan nanti rencana yang akan menutup Bapak Presiden langsung.

Jadi ini agak istimewa pelaksanaan Peparnas ini dan mudah-mudahan hal-hal yang muncul seperti biasa setiap penyelenggaraan pasti ada masalah urusan akomodasi, urusan konsumsi, urusan yang lain-lain tetapi secara keseluruhan tertangani, teratasi dengan baik. Itulah sebabnya kenapa waktu itu saya sampaikan pada Raker yang lalu memang saya harus berada di

sana, saya harus berkantor di Papua supaya begitu ada masalah langsung bisa teratasi. Itu gambaran tentang Peparnas.

Selanjutnya tentang pembahasan sanksi WADA Ibu Ketua. Jadi saya nanti akan mempersilakan Pak Ketua Tim Percepatan dan juga Investigasi Raja Sapta Oktohari dan juga akan dilengkapi oleh Pak Dokter Mus karena saya dengar Dokter Mus kemarin sudah memaparkan. Jadi ini adalah hal yang mengulang saja tetapi kita lebih banyak mendengarkan dari apa yang disampaikan yang sudah dikerjakan oleh ketua tim. Jadi secara garis besar saya ingin sampaikan bahwa begitu kami mendapatkan informasi tentang sanksi dari WADA terhadap LADI, jadi ini perlu kita *clear* bahwa yang di sanksi itu bukan pemerintah Indonesia tetapi WADA menyanksi LADI.

Kami mendapatkan pemberitahuan itu begitu sanksi sudah ada dan kemudian kita melihat langsung, saya koordinasi internal dan langkah yang saya lakukan adalah langsung membentuk tim percepatan penyelesaian sanksi WADA dan sekaligus investigasi. Saya kira ini satu kejadian yang menurut kita tidak boleh dibiarkan tetapi kita selesaikan tetap harus kita tahu apa penyebabnya. Nah ini maka dibentuk tim yang terdiri 7 orang, 2 orang dari NOC yakni Pak Ketua Umum dan Sekjen, kemudian 2 orang dari LADI sendiri, kemudian 2 orang dari perwakilan cabang olahraga. Saya memilih cabang olahraga yang sering bertanding di luar negeri dan yang akan mengadakan pertandingan dalam waktu dekat. Akhirnya kita pilih dari cabang bulutangkis dan angkat besi dan satu orang dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Satu orang ini hanya memfasilitasi saja Ibu Ketua, dia tidak punya hak apa-apa, hanya memfasilitasi saja.

Karena sebagaimana kita tahu bahwa LADI ini adalah satu organisasi yang independen dan memang itu yang diminta oleh WADA dan campur tangan pemerintah yang terlalu banyak yang akan dianggap sebagai intervensi itu juga akan melanggar aturan-aturan yang di WADA. Sehingga kami sangat hati-hati menyikapi ini, kami sangat memperhatikan betul apa yang menjadi pedoman dari WADA sehingga kami tidak dianggap intervensi. Karena kita sudah sebenarnya kita ini mengalami sanksi ini sudah pernah tahun 2016 yang lalu tetapi tidak seheboh dahulu itu karena memang kejuaraannya tidak muncul kemudian mungkin waktu itu kita tidak menang tetapi akhirnya tertangani.

Tetapi permasalahan yang muncul tentu berbeda, kalau tahun 2016 dianggap kita menggunakan laboratorium yang tidak sertifikasi ya, tidak terakreditasi sehingga dianggap bahwa kita melanggar, tidak *comply*, ini berbeda. Memang informasi yang masuk pada kami pertama itu hanya soal TDP/*Test Doping Plan* perencanaan kita yang tidak sesuai. Artinya perencanaan LADI yang tidak dengan apa yang sudah dilaporkan pada WADA. Memang di awal saya berpikir kalau hanya soal itu ya kita penuhi kewajiban kita dan kita merencanakan seperti apa kekurangannya bagaimana kita penuhi, saya awalnya berpikinya begitu.

Tetapi ternyata dalam komunikasi berikutnya muncul persoalan-persoalan yang sudah lama yang akhirnya kita baru tahu termasuk saya baru

tahu setelah komunikasi-komunikasi setelah kita disanksi itu. Ya ini terus terang hal-hal yang seperti ini juga menjadi pelajaran buat kita soal komunikasi, soal administrasi, soal pelayanan secara teknis. Tiga hal itu yang kami juga simpulkan harus kita benahi, harus kita perbaiki. Bahkan yang sebelum-sebelumnya tidak pernah meminta tentang undang-undang, sebagai contoh saja sekarang Undang-Undang SKN itu diminta oleh WADA. Kami terjemahkan dalam bahasa Inggris kami kirim. Peraturan-peraturan apa saja yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu juga diminta. Jadi banyak *item-item* yang sebelumnya tidak pernah dimintakan tetapi sekarang menjadi kewajiban.

Selanjutnya karena kita masih dalam masa sanksi maka pelaksanaan tes doping kita masih disupervisi oleh JADA. JADA ini adalah Lembaga Anti-Doping Jepang termasuk Peparnas sekarang. Peparnas sekarang itu harus disupervisi oleh JADA. Artinya pengambilan tes atau sampling doping kita harus diakui oleh JADA baru WADA-nya mau terima. Sebab kalau tidak kita langsung seperti sebelum ada sanksi itu tidak mungkin. Kita akan jalani kemudian kita sudah melakukan *MoU* dengan JADA sebagai supervisi kita dan mereka akan membantu kita.

Ini hal-hal yang kita sudah lakukan Ibu Ketua. Mudah-mudahan dengan langkah yang simultan yang kita lakukan, langkah percepatan pencabutan sanksi, langkah pemenuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang dimintakan oleh WADA dan memperbaiki komunikasi, serta bersamaan juga investigasi agar dilakukan oleh tim mudah-mudahan hal ini akan bisa mempercepat kita terlepas dari sanksi dan sekaligus kita memperbaiki tentang organisasi ini.

Terakhir Ibu Ketua karena sekarang kita sedang membahas tentang revisi Undang-Undang SKN karena pengalaman dan diskusi-diskusi dengan WADA kemarin kita harus mencantumkan tentang keberadaan lembaga anti-doping ini secara spesifik. Kalau kemarin di Undang-Undang SKN kita hanya sambil lalu bahwa kita memperhatikan tentang doping dan sebagainya sekarang tidak, itu harus cari spesifik ada komitmen dan ada komitmen dari pemerintah untuk membantu pembiayaannya. Oleh karena itu dalam rapat-rapat dengan WADA, Dirjen Anggaran kita libatkan supaya juga tahu tentang apa yang sedang dialami oleh LADI.

Demikian Ibu Ketua yang ingin saya sampaikan kaitan dengan agenda ini dan sekaligus saya mohon izin bila diperkenankan Bapak Raja Sapta Oktohari sebagai tim percepatan penyelesaian masalah LADI dengan WADA dan juga tim investigasi. Saya perlu jelaskan tadi ada dua tugas dari tim ini, yang pertama adalah mempercepat penyelesaian masalah LADI dengan WADA dengan selengkap-lengkapnyanya, yang kedua adalah menginvestigasi tentang kenapa ini terjadi. Kami akan melakukan apa pun yang direkomendasikan nanti. Jadi kalau ditanya apa yang dilakukan? Ya saya tunggu tim investigasi.

Untuk itu izinkan saya mempersilakan ketua tim investigasi, Bapak Raja Sapta Oktohari.

KETUA RAPAT:

Baik silakan kepada Bang Okto dan terima kasih Pak Menteri atas pemaparannya yang juga blak-blakan yang mengakui apa saja kelemahan yang ada maupun apa yang sudah dilakukan untuk mempercepat pencabutan sanksi ini.

Silakan mungkin kita dengarkan tambahan paparan dari Ketua Tim Akselerasi dan Investasi Sanksi WADA ini. Bang Okto silakan.

KETUA UMUM KOI (RAJA SAPTA OKTOHARI):

Terima kasih Ibu Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera.

Selamat sore.

Salam olahraga.

Ibu Ketua yang kami hormati, Ibu Hetifah.

Pimpinan Komisi X, Para Kapoksi, Para Anggota Dewan yang terhormat.

Pak Menpora saya yang selalu saya banggakan beserta jajaran.

Ketua LADI beserta jajaran.

Tentunya Tim Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA.

Di awali tentunya dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* semoga apa yang dilakukan bisa mempermudah dan mempercepat proses pengibaran kembali bendera merah putih bisa segera terealisasi. Saya ingin membuka dengan legal aspek yang ada dari tim ini bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional itu menyebutkan tentang doping yaitu pertama doping dilarang dalam semua kegiatan olahraga. Kedua, setiap induk organisasi olahraga dan/atau lembaga atau organisasi olahraga nasional wajib membuat peraturan doping dan disertai sanksi. Ketiga pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah.

Saya ingin mengutip *Olympic Charter* atau Piagam Olimpiade di aturan Nomor 27 misi dan peran NOC yang untuk mengadopsi dan menerapkan kode anti-doping dunia untuk mendorong dan mendukung tindakan yang berkaitan dengan perawatan medis dan kesehatan atlet. Aturan 43 kode anti-doping dunia dan gerakan Olimpiade kode tentang pencegahan manipulasi kompetisi, kepatuhan terhadap kode anti-doping dunia dan kode gerakan Olimpiade tentang pencegahan manipulasi kompetisi adalah wajib seluruh gerakan Olimpiade.

By law to rule 44 atau penjelasan tentang Aturan 44 Nomor 4 sebagai prasyarat untuk berpartisipasi dalam Olimpiade, setiap peserta harus mematuhi semua ketentuan Piagam Olimpiade dan aturan internasional federasi yang mengatur olahraganya. NOC yang mendaftarkan atletnya

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para atlet tersebut sepenuhnya sadar dan patuh kepada Piagam Olimpiade dan kode anti-doping dunia. Nomor 6 semua peserta Olimpiade dalam kapasitas apa pun harus mematuhi proses pendaftaran seperti yang ditentukan oleh dewan eksekutif IOC (*International Olympic Committee*) termasuk penandatanganan formulir pendaftaran yang mencakup kewajiban untuk: 1) mematuhi Piagam Olimpiade dan *world anti-doping code* dan 2) menyerahkan sengketa ke yuridisi CHS.

Menurut aturan WADA Code aturan 20.4.6 untuk bekerja sama dengan organisasi anti-doping nasional dan untuk bekerja dengan pemerintah di mana belum ada organisasi anti-doping nasional di negara tersebut dengan ketentuan bahwa untuk sementara Komite Olimpiade Nasional atau NOC atau yang ditunjuk harus memenuhi tanggung jawab organisasi anti-doping nasional untuk negara-negara yang menjadi anggota organisasi-organisasi anti-doping regional Komite Olimpiade Nasional bekerja sama dengan pemerintah harus mempertahankan peran aktif dan mendukung dengan organisasi anti-doping regional masing-masing. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 74 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi *World Anti-Doping Agency* (WADA) ditanda tangani pada tanggal 18 Oktober 2021.

Selanjutnya dalam rapat asosiasi *National Olympic Committee* yang terlaksana di Yunani, kesempatan itu juga Presiden WADA menyampaikan bahwa memang dipertegas bahwa apabila di dalam satu negara itu belum terbentuk NADO atau *National Anti-Doping Organization* maka NOC bertindak dalam kapasitasnya sebagai NADO di negara tersebut. Saya cantumkan di situ pidatonya "jika tidak ada organisasi anti-doping nasional yang eksis di negara Anda, maka Anda sebagai Komite Olimpiade Nasional (NOC) harus menjalankan peran ini dan bertindak sebagai Organisasi Anti-Doping Nasional (NADO) sehingga dapat memastikan implementasi penuh dari program anti-doping yang sesuai dengan kode atau regulasi WADA di negara Anda.

Surat kepada NOC Indonesia juga disampaikan oleh IOC terkait dengan doping. Di sini mungkin enggak kelihatan, *sorry* sebelumnya mungkin terlalu kecil itu tapi sudah kita sampaikan ke Bapak/Ibu sekalian di situ ada surat juga yang memperingatkan kepada NOC yang dikirim langsung oleh Direktur Jenderal IOC terkait dengan sanksi yang akan dijatuhkan kepada Indonesia. Selanjutnya surat WADA kepada LADI tanggal 13 Februari 2020 *compliance with the world anti-doping* atau kepatuhan terhadap kode anti-doping dunia. Selanjutnya WADA kepada NOC Tanggal 20 Maret 2020, *next*. WADA kepada NOC 20 Maret 2020. Apresiasi komitmen NOC Indonesia yang memastikan program anti-doping LADI kokoh terhadap kode anti-doping dunia.

Surat IOC kepada NOC tanggal 6 September 2021. Informasi ketidakpatuhan LADI terhadap kode anti-doping dunia dan menjelaskan konsekuensi yang akan diterima Indonesia. Surat WADA kepada LADI pada tanggal 7 Oktober 2021 LADI resmi mendapatkan sanksi karena ketidakpatuhan terhadap kode anti-doping dunia. Tindak lanjut surat NOC

pada WADA tanggal 16 Maret 2020 memastikan LADI adalah organisasi yang secara struktural ada di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kedua, NOC kepada IOC tanggal 9 September 2021 NOC telah berkomunikasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan bertemu dengan kepengurusan LADI untuk segera menyelesaikan *pending matters* yang diterima oleh WADA.

Selanjutnya surat ini mungkin cukup familier karena saya percaya surat ini sudah menjadi bahan materi utama dalam setiap pembahasan tentang sanksi WADA yaitu surat pada tanggal 7 Oktober tentang *non-compliance with the world anti doping code* sehingga dijatuhkannya lah sanksi kepada Indonesia selama 1 tahun. Di mana isi dari sanksi tersebut Indonesia tidak boleh menjadi penyelenggara dari *event-event* internasional, Indonesia tidak boleh mengibarkan bendera merah putih, Indonesia tidak boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya, bahkan Indonesia tidak boleh memiliki perwakilan-perwakilan di dalam badan-badan organisasi dunia sementara sanksi masih dijatuhkan.

Selanjutnya tugas dan fungsi dari Gugus Tugas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA sesuai dengan SK Kepmen Nomor 74. Tugas dan fungsi seperti disampaikan oleh Pak Menpora tadi secara langsung bahwa satu, melakukan komunikasi dan koordinasi dengan WADA terkait penyelesaian sanksi. Fokus kerja yang kedua melakukan investigasi dalam rangka pemenuhan penyelesaian sanksi dari WADA. Ketiga, melakukan percepatan dan langkah strategis berkaitan dengan penyelesaian sanksi WADA dengan tetap berpedoman *World Anti Doping Agency Code*.

Fokus kerja yang pertama komunikasi dan akselerasi yang kedua investigasi. Saya ingin menggaris bawahi Pimpinan, para Anggota Dewan yang terhormat, Bapak Menpora, bahwa fokus kami yang pertama itu komunikasi dan akselerasi setelah itu baru investigasi. Karena kita ingin memastikan dahulu proses akselerasi ini tidak terganggu dengan proses investigasi yang pasti akan kita lakukan sesuai dengan amanah yang kami terima. Selanjutnya adalah pemetaan masalah. Yang pertama komunikasi, yang kedua administrasi, ketiga teknik.

Jadi setelah kami dalami ternyata permasalahannya itu terbagi atas tiga bagian. Yang pertama adalah komunikasi di mana di komunikasi ini terjadi banyak sekali miskomunikasi. Jadi kalau tadi Pak Menpora bilang baru tahu itu sebab utamanya lebih banyak karena memang miskomunikasi dan itu kami jelaskan langsung kepada WADA, nanti kami sampaikan. Jadi komunikasi itu kesulitan akses komunikasi keputusan LADI ke WADA, RADO Asia dan SIRADO karena masih melalui email sehingga respons antar kedua belah pihak lambat.

Aksi dari ketua gugus tugas *ex officio* ketua NOC Indonesia langsung bergerak bertemu dengan WADA dan IOC untuk membuka jalur komunikasi agar percepatan pencabutan sanksi terhadap LADI bisa segera dilakukan. Kami telah menerima amanah dari Pak Menpora kami berangkat ke ANOC *meeting* di Yunani. Di dalam kesempatan itu di tanggal 24 Oktober kita

bertemu langsung dengan Presiden IOC dan menjelaskan bahwa situasi di Indonesia ini terkait dengan tiga permasalahan tadi. Yang pertama masalah miskomunikasi, yang kedua masalah administratif, yang ketiga masalah teknis.

Yang paling pertama itu tentunya masalah miskomunikasi. Miskomunikasi ini sangat parah karena selama ini saya jelaskan kepada Presiden Witold Banka yaitu Presiden WADA dan juga Olivier Niggli Direktur Jenderal WADA, saya jelaskan kepada mereka secara langsung karena waktu saya bertemu sama mereka, mereka kaget. Saya bilang saya Presiden NOC dari Indonesia, dia bilang "*this is the trouble maker*" katanya begitu. Saya bilang "*ntar* dahulu" saya bilang. Yang kalian lakukan ini bukan hanya mengganggu kinerja olahraga di Indonesia tapi mengganggu stabilitas politik di Indonesia karena bangsa Indonesia hari ini itu lagi semangat-semangatnya untuk mengadakan *event-event* olahraga bahkan kita berniat untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 atau 2036.

Saya sampaikan sama mereka bahwa selama ini terjadi miskomunikasi di mana bahkan kepada saya saja emailnya tidak sampai. Saya sampaikan pada mereka, ini kartu nama saya, lihat email saya resmi. Email saya resmi oktohari@nocindonesia.id. Jadi kalau kamu kirim email ke Gmail atau YouTube atau apa segala macam saya enggak tahu itu email siapa dan saya enggak tahu juga kamu dapat dari mana itu. Nah itu nanti kita bahas kemudian. Setelah itu kita perdalam dengan mereka baru lebih jelas kenapa sampai tadi Pak Menpora bilang baru tahu karena memang selama ini tidak pernah dilaporkan secara langsung baik itu kepada kepengurusan yang sekarang maupun ke jajaran Pak Menpora.

Bahwa informasi-informasi yang dikirimkan oleh WADA ternyata terjadi *bottlenecking* dan tidak terdistribusikan dengan baik. Hasil dari komunikasi itu karena di situ kita berkesempatan untuk berkomunikasi dengan banyak pihak yang sangat berkompeten untuk melakukan penyelesaian permasalahan ini sehingga terjadi akhirnya relaksasi. *Alhamdulillah* per hari ini hanya melalui komunikasi Indonesia tetap bisa melaksanakan *event-event* yang telah direncanakan sehingga semua *event* di Indonesia dipastikan bisa dilaksanakan sesuai dengan program-program yang telah direncanakan. Yang kedua lagu Indonesia Raya akan selalu bisa dikumandangkan apabila atlet naik ke panggung-panggung yang dimenangkan. Jajaran-jajaran perwakilan Indonesia di kancah-kancah dunia tetap di posisi mereka masing-masing walaupun sanksi ini telah dijatuhkan.

Yang terakhir memang terkait dengan bendera merah putih, pengibaran sementara masih kejar karena dari sanksi yang dijatuhkan yaitu 1 tahun tetapi dari program yang direncanakan kita *Insyallah* itu dalam waktu 6 bulan ini semua bisa terealisasi, bisa kembali seperti semula. Tetapi waktu 6 bulan tentunya masih sangat terasa lama, ini kami memberikan apresiasi kepada ketua LADI beserta jajarannya tentunya dengan kerja sama yang baik dengan teman-teman dengan para petinggi dari Kemenpora tentunya ada Pak Menpora dan jajaran Pak Gatot yang secara langsung itu

memberikan atensi khusus dan bersama-sama berkomunikasi dengan semua *stakeholders* dari anti-doping dunia itu WADA, JADA, SIRADO dan lain-lain.

Dari hasil rapat koordinasi yang kami lakukan terakhir. Terus tanggal 30 Oktober juga, semua kejadian yang saya laporkan tadi itu terjadi tanggal 24 Oktober. Terus tanggal 30 Oktober kami berkesempatan bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo dan Pak Presiden Minta laporan ter kini laporkan atas izin Pak Menpora bahwa saya ditunjuk sebagai ketua gugus tugas dan telah melakukan komunikasi dan presiden menyampaikan memberikan atensi khusus, atensi langsung dan ingin semua proses ini agar bisa dilakukan secara profesional dan menuntaskan investigasi secara transparan.

Tanggal 2 November rapat virtual dengan WADA, SIRADO, dan JADA. Itu saya minta maaf mukanya kayak orang baru bangun tidur karena memang baru bangun tidur. Rapat itu terjadi pada saat saya berada di Georgia, Sekjen saya berada di Paris, teman-teman yang lain berada di Indonesia dilakukan oleh WADA yang berada di Montreal dan JADA yang berada di Jepang maupun SIRADO yang ada di Singapura. Waktu itu jam 11 siang waktu Singapura, jam 10 waktu Indonesia, jam 6 pagi waktu Georgia, jam 4 pagi waktu Paris.

Dari situ baru kelihatan bahwa memang setelah komunikasi terbuka secara langsung baik itu LADI atau kita sebutkan NADO/*National Anti-Doping Organization* Indonesia itu semuanya jadi lebih mudah. Kami sekali lagi memberikan apresiasi kepada Dokter Zaini, Dokter Rheza, dan Dokter Dessy yang sangat intensif, Musthofa Fauzi. Oh ya Dokter Zaini yang lama, sudah ganti ya? Dokter Musthofa Fauzi, Dokter Rheza dan Dokter Dessy yang secara intensif. Bahkan tadi pagi juga kami percaya telah melakukan komunikasi langsung dengan WADA dan JADA.

Dari *timeline* yang kami lihat ini *timeline* yang cukup menantang di mana ada tantangan besar untuk menyelesaikan tes doping yang kebutuhannya itu 200 dari Peparnas 122 dari OOCT dan seperti hasil rapat terakhir dengan para *stakeholders* terutama LADI untuk Peparnas akan selesai pada tanggal 15 November per hari ini sudah lebih dari 60% dan untuk OOCT itu akan selesai akhir bulan November. Kembali ke tiga permasalahan tadi. Jadi yang pertama tadi miskomunikasi kami anggap per hari ini *alhamdulillah* sudah selesai dan memberikan banyak solusi kepada kita yang kedua masalah administratif.

Jadi ada 24 poin di awal-awal yang semuanya mengagetkan. Jadi kita sendiri bahkan LADI pun tidak tahu 24 poin itu isinya apa saja begitu kira-kira Dokter Musthofa ya? Dan dalam perjalanan ternyata 24 poin ini berkembang tapi kita tidak fokus kepada poin administratif karena di belakang itu masih ada poin teknis. Nah poin teknis yang selalu ditanya langsung oleh WADA kapan kamu selesai, jadi kita enggak punya bahan untuk komunikasi sebelum materi teknisnya selesai. Makanya kita kejar apabila bisa proses ini bisa selesai di bulan November nanti di bulan Desember *Insya Allah* kami akan

minta waktunya Pak Menpora supaya kita bisa sama-sama berangkat ke WADA Pak Menpora itu.

Untuk menjelaskan sama mereka bahwa sanksi administratif sudah selesai, komunikasi sudah selesai, teknik sudah selesai jadi enggak ada alasan lagi WADA untuk memberikan sanksi dan mudah-mudahan dengan cara ini *lifting*-nya terhadap sanksi itu bisa dipercepat. Jadi ini ikhtiar yang coba kita lakukan dan sambil jalan secara simultan semua komunikasi kita tetap kita bangun dan mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Dokter Musthofa kaitannya dengan komunikasi yang tadi pagi dilakukan oleh WADA.

Per hari ini memang semua komunikasi secara intensif telah kami buka kanalnya. Kami dari NOC sendiri itu telah menunjuk beberapa perwakilan yang kita tempelkan ke setiap unsur-unsur di anti-doping. Katakan satu perwakilan dari media internasional kami yang terus berkomunikasi dengan Sekjen WADA dan kami juga punya Wakil Sekjen yang berkomunikasi dengan SIRADO. Kebetulan dari Singapura jadi lebih mudah untuk komunikasi dengan SIRADO yang tempatnya di Singapura.

Kaitan dari semua ini kami melihat ini memang sebuah situasi yang tidak enak. Tetapi harapannya tentunya setelah kejadian ini kita memiliki badan anti-doping yang independen, profesional, bisa dipertanggungjawabkan dan modern. Saya tambahkan kenapa ada kata modern karena enggak etis rasanya sebuah lembaga anti-doping yang independen kalau emailnya masih pakai email umum begitu kira-kira. Jadi ini juga harus *clear* begitu bahwa dari hal-hal sepele seperti itu, itu bisa menunjukkan keseriusan dari institusi tersebut.

Mungkin itu Ibu Ketua kami terbuka untuk forum diskusi. Selanjutnya kami kembalikan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Pak Raja Sapta Oktohari.

Pak Dokter Mus ada yang mau ditambah? Izin Ibu Ketua, Ketua LADI.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Mus.

KETUA UMUM LADI (dr. MUSTHOFA FAUZI):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi X.
Para anggota dewan yang kami hormati.
Bapak Menteri.
Pak Ketua NOC.
Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati.**

Saya ingin menambahkan sebagaimana seperti apa yang saya tampilkan kemarin dua hari yang lalu. Itu saya kira itu sudah lengkap sekali dan detail mendalam. Saya hanya menambahkan beberapa hal perkembangan selama 2 hari ini. Dari komunikasi kami, ini masalah komunikasi dahulu penyelesaian administratif kekurangan-kekurangan yang diharapkan oleh WADA adalah yang pertama ingin kami sampaikan bahwa kami masalah struktur organisasi. Kami setelah berkoordinasi dengan Kemenpora untuk mengubah struktur organisasi ini secara total.

Yang pertama di mana di sana ada semacam *board of commissioner*, kemudian *board of director*, kemudian *director*-nya dan ini terpisah dengan *result* manajemen dan TUE. TUE itu *Therapeutic Use Exemption* dan itu memang sesuai dengan ketentuan dari WADA. Sehingga struktur organisasi ini telah kami susun hanya kelengkapan untuk *board of commission* kami masih mau berkonsultasi dengan Pak Menteri dan jajarannya. Karena ini tidak boleh ada kaitan sama sekali dengan Kemenpora dengan bidang-bidang olahraga ataupun KONI ataupun cabang-cabang olahraga. Termasuk kita kepengurusan sama sekali harus *clear and clean* dari kaitannya kepentingan-kepentingan yang nantinya ditakutkan ada benturan.

Kemudian yang kedua, kami pastikan bahwa semua staf yang akan menduduki di jabatan-jabatan ini adalah bebas dari *conflict of interest*, sehingga pekerjaannya juga kami lampirkan sebagai apa dan apa supaya kita tidak, karena dalam dua hari kemarin kita salah satu ada petugas kita yang salah satu Wakil Direktur Analisis dan Testing, itu ternyata mereka langsung tahu ini ada kaitan dengan dunia olahraga. Sehingga mereka langsung protes, langsung kami coret dan semuanya.

Kemudian perkembangan selanjutnya agar organisasi ini jadi independen dan profesional, kami saat ini sedang berlangsung untuk pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang selama ini memang tidak ada. Karena LADI selama ini memang digaungkan independen dan profesional, tapi dia terkait langsung di Kemenpora layaknya seperti di unit kerjanya Kemenpora kalau tidak ada AD/ART-nya. Saat ini sedang diproses untuk pembuatannya dibantu oleh tim dari Kemenpora. Dengan adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga selanjutnya kita sahkan ke notaris, selanjutnya juga bisa didaftarkan di Kemenkumham sebagai suatu lembaga tersendiri, entitas tersendiri.

Kemudian untuk itu juga dengan adanya kelembagaan ini menjadi independen yang ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka *annual budget* itu bisa lebih mudah untuk dilakukan, *budget*-nya itu pisah menjadi, selama ini kan *budget* kita ada tapi dikaitkan di Kemenpora dan ini sesuai dengan yang diinginkan WADA sebagaimana dari 24 kelengkapan ini.

Begitu juga yang yang perlu kami sampaikan di rapat kerja ini adalah hubungan dengan *sport act* adalah di poin nomor 6 bahwa hukum-hukum yang menyangkut, undang-undang yang menyangkut keolahragaan ini harus mencantumkan kelembagaan ini dan kami tadi laporkan pada saat pertemuan kami tadi pagi dengan WADA melalui Zoom *meeting* bahwa kami telah didukung oleh parlemen untuk masalah nama lembaga ini, kelembagaan ini akan masuk dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional.

Ada satu saran yang menarik dari mereka kalau bisa kami tahu dahulu nanti seperti apa nanti ininya dan kami akan *share* ke mereka dahulu dan ini apakah *inline* dengan ketentuan-ketentuan mereka. Yang dikhawatirkan kita sudah masuk tapi tidak *inline* dengan WADA, World Anti-Doping Code ini takutnya nanti dianggap kita masih juga tidak patuh. Ini usulan dari mereka dan saya kira ini cukup bagus dan menarik yang perlu kami sampaikan.

Kemudian yang selanjutnya perkembangan masalah teknis, tadi cukup detail dan mereka sangat mengapresiasi kecepatan kita dalam melakukan *corrective action* seperti apa yang mereka inginkan, mereka sangat *appreciate* kecepatan kita. Masalah teknis ini yang pertama adalah yang menjadi supervisi daripada Jepang Anti-Doping Agency yaitu masalah supervisi Peparnas dan pemeriksaan doping di luar kompetisi, Peparnas dalam kompetisi.

Ada 200 sampling, sampel yang akan kita kumpulkan dan saat ini telah masuk sekitar 60% dengan melalui satu sistem, *anti-doping administration management system* yang kita *join* yang sudah kita berikan juga *password*-nya ke JADA, dia bisa monitor langsung. Jadi apa yang kita lakukan bisa monitor *by system*, mereka bisa melihat apa yang sudah kita masukkan, kita lakukan dan saat ini sudah sekitar 60% daripada atlet Peparnas sudah kita *setting* dan kita masukkan datanya ke dalam sistem dan ini langsung di monitor oleh JADA dan dilaporkan, dimonitor oleh WADA juga.

Kemudian kami masalah yang teknis yang lain adalah yang ditanyakan juga adalah masalah 122 sampel *out of competition*, di luar kompetisi yang akan kita laksanakan setelah Peparnas dan kami telah menyiapkan rencananya untuk melakukan pengambilan sampel 122 atlet itu dan kami perkirakan menjelang akhir November sudah semua implementasi ini. Selanjutnya dari pertemuan kami tadi pagi, mereka akan memonitor terus dan mereka membuka komunikasi manakala kita ada kebutuhan untuk berkonsultasi dan sebagainya.

Hal yang lagi yang penting juga adalah masalah re-sertifikasi doping *control officer* kita, kita mempunyai 45 *doping control officer* yang register, sudah kita berikan *lisence* dan akan berakhir sekitar 12 Desember nanti dan

kami berjanji bahwa di awal Desember kita akan melakukan re-sertifikasi *doping control officer* dan mungkin akan melibatkan narasumber, pelatihnya juga dari SIRADO dari ASEAN *Regional Anti-Doping Officer*. Sehingga mereka akan bisa melihat langsung apa yang kita lakukan dan ini pelaporannya langsung ke WADA.

Saya kira ini saja dari kami tambahannya perkembangan ter kini dari upaya-upaya kita untuk mempercepat proses pengenaan sanksi ini.

Terima kasih.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Terima kasih Dokter Musthofa.

Pimpinan dan Anggota Komisi X yang terhormat.

Itu pemaparan dari Ketua Tim Percepatan dan Investigasi Pak Raja Sapta Oktohari dan juga tadi dilengkapi oleh Dokter Musthofa tentang komunikasi sampai dengan tadi pagi. Jadi sekarang ini yang tadinya komunikasi ini menjadi masalah, sekarang sudah sangat lancar dan tentu saya berterima kasih kepada Pak Raja Sapta Oktohari yang sudah membuka komunikasi ketika pertemuan di Eropa, langsung dengan Presiden WADA dan akhirnya sekarang sudah bisa diselesaikan.

Memang ada satu hal yang tadi juga disampaikan oleh Dokter Musthofa, saran dari WADA sebelum kita menuangkan di dalam revisi Undang-Undang SKN itu mungkin mereka perlu kita beritahu seperti ini, isinya. Tentu itu hanya ada di pasal-pasal tertentu, jadi itu Dokter Mus ya yang kita kirimkan, kita lihat. Kalau memang sudah seperti itu ya sudah, karena kita enggak ada pilihan lain. Kita enggak ada pilihan lain harus menuruti WADA ini karena kita sudah karena menandatangani Konvensi Anti-Doping Dunia. Jadi ini harus kita patuhi dan gambaran yang sampaikan oleh Dokter Musthofa nantinya LADI ini benar-benar menjadi satu lembaga independen dan profesional. Tadi Bahasa Pak Okto jangan pakai yang gratis-gratisan emailnya katanya, jadi memang benar-benar yang seperti itu dan kita pemerintah pun tidak bisa lagi seperti yang ada sekarang ya.

Oleh karena itu maka *budget*-nya mereka juga akan langsung kepada mereka, akan langsung. Kalau sekarang ini kan melalui kita, langsung kepada mereka, sehingga menghindarkan intervensi dan kepentingan kita di situ. Karena itu dalam pertemuan dengan WADA, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan sudah ikut Ibu Ketua, sehingga tahu persis begitu nanti sudah kita wujudkan di dalam pasal di Undang-Undang SKN nanti itu bahwa inilah kewajiban kita.

Demikian Ibu Ketua, Bapak/Ibu Anggota Komisi X yang terhormat pemaparan yang kami sampaikan sehubungan dengan agenda rapat kerja kita pada siang hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Saudara Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga tentunya sebagai Ketua Tim Akselerasi dan Investigasi Penyelesaian Sanksi WADA dan juga kepada Ketua LADI. Tadi sangat *curious* ya saya juga penasaran ingin mendengar dari hari ke hari perkembangannya, *alhamdulillah* ya banyak kemajuan dalam beberapa hari ini dan berita-berita yang cukup membesarkan hati, tadi ada relaksasi, kemudian juga prospek-prospek penyelesaian dan juga tadi ikhtiar ataupun langkah-langkah percepatan yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi ini.

Saya ingin memberi kesempatan kepada teman-teman semua hadir di sini teman dari PDIP Doktor Andreas Hugo Pareira dan juga ada Kiai Mujib Rohmat dari Golkar, dan juga hadir dari Gerindra ada dua orang ini Kiai Elnino dan Prof. Djohar Arifin, kemudian juga dari Fraksi PKB Gus An'im kalau ini sudah jelas kiainya dan juga dari PAN, adik kita Mitra Fakhruddin. Silakan kepada teman-teman ya jika ada hal-hal yang ingin, oh ada Kang Ferdi juga, ya barusan hadir, oh Pak Syamsul ya, tadi Gus An'im mana? Oh iya berarti ada tambah lagi ini satu lagi ini. Kemudian Pak Syamsul ya dari Nasdem, lengkap sudah.

Silakan mungkin bagi teman-teman yang ingin melakukan pendalaman ataupun juga ingin menyampaikan pandangan-pandangan dan juga catatan-catatan dalam pertemuan ini kita beri kesempatan terlebih dahulu ya kepada teman-teman dari Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Terima kasih Pimpinan.

Mohon izin saya minta waktu lebih dahulu karena mungkin juga tidak bisa hadir sampai selesai. Saya ingin meminta konfirmasi karena ini kan pertanyaan publik, terkait publik bahwa di tengah berbagai macam kesuksesan kita untuk melakukan *event-event* olahraga, juga ada bulu tangkis kita yang sukses mulai dari Olimpiade kemarin, terus kemudian kita juga sukses melaksanakan PON. Tapi kita dikejutkan dengan peristiwa di Thomas Cup ini, jadi kasus anti-doping ini.

Pertanyaan publik bahwa ini sudah terjadi karena kemarin juga sudah banyak mendengar dari Pak Ketua LADI dan hari ini juga menyampaikan informasi dan konfirmasi berita yang terakhir. Yang ingin kita ketahui dan saya kira saya yakin publik ingin tahu karena ke depan kan kita masih banyak *event-event* olahraga yang lain kan, juga bahkan ada pelaksanaan yang akan dilakukan di kita, *motor super bike*, atau yang lain-lain lah yang ke depan.

Ini kapan begitu sanksi ini dicabut sehingga kemudian kita ya tidak harus lagi seperti kemarin apa yang terjadi di Thomas Cup, juga tidak menjadi ganjalan kalau kita akan menjadi tuan rumah dari *event* olahraga internasional. Apakah sudah ada konfirmasi bahwa ini akan dicabut begitu

dan kapan itu akan dicabut, saya kira itu yang paling penting dan publik ingin mengetahui itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kita lanjut saja dahulu ya kepada Fraksi Golongan Karya di sini ada dua orang, silakan mau memulai dari siapa. Mas Mujib dahulu.

F-P. GOLKAR (Dr. H. A. MUJIB ROHMAT, M.H.):

Iya nanti gongnya Pak Ferdi.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan rapat yang saya hormati.

Temannya Komisi X yang ikut baik secara fisik maupun virtual.

Pak Menteri yang saya hormati dengan seluruh jajarannya.

Ketua KOI Mas Okto, Bapak Dokter Musthofa Ketua LADI.

Seluruh hadirin yang berbahagia.

Pertama, tentu saya ingin memberikan apresiasi kepada Pak Menteri di tengah-tengah kondisi pandemi yang semacam ini empat sukses PON ini bisa diperoleh. Yang pertama tadi adalah sukses penyelenggaraan, kemudian sukses prestasi, kemudian sukses ekonomi untuk lingkungan dan sukses administrasi yang ini nanti akan disusul kemudian dan yang terakhir ini biasanya memang yang sangat ditunggu-tunggu oleh semuanya, semuanya tertib semuanya sehingga tidak ada masalah administrasi yang apalagi berkaitan dengan masalah hukum.

Pak Menteri barangkali ini nanti di dalam sukses yang berikutnya kita harapkan itu ada penjelasan tentang sukses publikasi Pak Menteri. Karena kemarin kita juga mendengarkan pandangan-pandangan dari SIWO yang kita hadirkan di tempat ini. Jadi berkaitan dengan soal publikasi mungkin nanti pada saat menyampaikan informasi tentang sukses administrasi di dalamnya adalah bisa dimasukkan sukses publikasinya.

Kemudian yang kedua adalah saya juga memberikan apresiasi karena kalau tadi akselerasi gugus tugas untuk menyelesaikan masalah ini, tapi sebelumnya juga akselerasinya Pak Menteri sendiri cepat sekali menangani ini, kemudian dengan membentuk gugus tugas percepatan tadi itu juga perlu di-*appreciate* oleh kita. Karena kemarin yang terjadi adalah karena tidak melakukan tindakan-tindakan percepatan, sehingga yang terjadi adalah putusnya komunikasi.

Kepada Saudara Ketua KOI saya kira juga ini juga luar biasa cepat sekali melakukan tindakan-tindakannya, sehingga tadi sudah melahirkan kesepakatan relaksasi dan sebagainya. Saya kira ini diharapkan betul-betul *event-event* yang kita selenggarakan nanti ini atau bahkan mungkin minggu

depan dan kemudian lagi ada moto GP juga dan sebagainya bisa berjalan dengan lancar semuanya. Kemudian apresiasi juga kepada Ketua LADI, ini Pak Menteri kemarin kita komentari ini. Pak Menteri pas juga ini yang dipilih itu Al Musthofa Pak, ini berarti orang-orang yang terpilih Pak. Orang yang terpilih untuk menyelesaikan masalah, baik masalahnya dengan WADA maupun masalah di dalam internal LADI sendiri.

Salah satu di antaranya adalah Pak Menteri, supaya tertib organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Misalnya sedih sekali kita, mula-mula teman-teman ini sudah siap-siap untuk iya katakanlah akan banyak bertanya sekali dengan Pak Musthofa, tapi setelah Pak Musthofa menjelaskan secara detail kita kemudian malah terenyuh Pak Menteri dan kemudian kita empati dengan Pak Musthofa dan teman-teman yang telah melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa.

Tertib organisasi ini kelihatannya yang menjadi masalah utama adalah itu Pak Menteri, yaitu karena perpindahan itu tidak dilengkapi dengan perpindahan informasi, masalah yang terjadi dan sebagainya itu tidak disampaikan kepada pengurus yang baru sehingga ini menjadi kayak apa ya putus begitu, putus dari pengurus yang lama ke pengurus baru. Ini kayak Ormas-ormas yang binaannya Pak Menteri itu, banyak yang seperti itu Pak Menteri, tidak ada laporannya kepada yang berikutnya, termasuk laporan yang biasanya dilaporkan suksesnya saja masalahnya enggak dilaporkan.

Dari kejadian ini saya berharap ini ternyata punya hikmah ketika kita sedang dalam proses menyusun undang-undang, revisi Undang-undang SKN ini. Misalnya Pak Menteri, ini yang belum disampaikan kepada kita oleh Pak Menteri nanti itu *pasca* PON itu bagaimana Pak terhadap pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh, yang selama PON ini. Karena kita sudah sekian kali melihat beberapa daerah itu kondisinya memprihatinkan, seperti daerahnya Pak Ketua, yaitu di Kalimantan Timur dan kemudian juga di daerah-daerah lain.

Kita juga mengusulkan misalnya nanti kalau ke depan ini di Aceh dan Sumatera Utara, di tempatnya Pak Profesor Djohar ini barangkali kita harapkan kalau mereka menyampaikan proposalnya Pak Menteri itu harus di dalamnya sudah ada kepastian, habis itu *maintenance*-nya seperti apa, usulan *maintenance*-nya seperti. Apakah ini nanti akan juga dimasukkan ke dalam katakanlah disinggung sedikit dalam norma undang-undang, tetapi nanti diikuti oleh peraturan pemerintah yang setiap kali, jangan sampai misalnya membuat kita senang saja, tapi habis itu enggak.

Misalnya kasus yang dahulu itu seolah-olah daerah itu jor-joran dengan mengatakan, kami siap untuk *me-maintenance* ini dan sebagainya tapi giliran pada saat PON-nya itu muncul lagi bahwa dia mengajukan anggaran lagi, katanya dia kan *share* anggaran sekian. Nah seperti halnya yang kemarin ini untung Pak Menteri bersama-sama kita juga kita awasi, kita dukung Pak Menteri, kita ikut membantu Pak Menteri untuk jangan misalnya muncul anggaran yang di luar daripada anggaran yang ada dalam RKA K/L kita yang tidak muncul dalam pembahasan kita yang 1,4 yang terakhir kemarin. Saya

kira itu satu ketelitian dari Pak Menteri, yang juga kita dukung untuk diingatkan jangan sampai muncul di ujung-ujung, kemudian lalu ada bermasalah secara administratif.

Kemudian yang kedua, tadi ternyata LADI, WADA menginginkan supaya LADI ini ada di dalam undang-undang kita, nanti tinggal nanti penempatannya. Cuma kemarin kita juga diskusi Pak Menteri tentang dua hal, pertama adalah LADI ini nanti kira-kira kalau yang disebut menteri nanti di sana itu siapa. Karena dilihat ada Dokter Musthofa, Dokter Rheza, kemudian Dokter Dessy itu semuanya adalah dokter-dokter semua Pak Menteri. Apakah ini lebih menonjol ke dokternya, ke kesehatannya atau ke Kementerian Pemuda dan Olahraga atau ada badan yang independen betul nanti kementerian yang ada di dalam, di atasnya yang menjadi entah itu penasihat, entah itu dan sebagainya, itu bisa dari sekian kementerian.

Saya kira itu Pak Menteri, yang terakhir adalah soal sedihnya kemarin kami dari Komisi X itu mengomentari tentang anggarannya LADI yang hanya 7 miliar kemarin Pak Menteri. Sehingga dengan demikian ya ini kalau betul sudah menjadi lembaga betul-betul independen dan kemudian itu mendapatkan pengesahan dari Menkumham, saya kira mungkin anggarannya akan terpisah dari yang kemarin. Sehingga dengan demikian LADI bisa berbuat sesuatu yang lebih besar lagi dan maksimal.

Kemudian termasuk di dalamnya kemarin kita ingatkan supaya struktur organisasi itu betul-betul sudah dilengkapi, terutama Direktur Edukasi ya Pak, karena ini kaitannya dengan sekian cabor dan sebagainya Pak Menteri, supaya Direktur Edukasinya yang kemarin mundur, dua orang mundur dan kita minta supaya segera bisa dipenuhi dan strukturnya nanti tentu dikomunikasikan dengan Pak Menteri Pemuda dan Olahraga.

Saya kira itu yang ingin kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Mas Mujib. Karena ini Mas Mujib ini termasuk salah satu yang paling intensif ini mengawal Undang-Undang SKN begitu, jadi catatan-catatannya tadi iya kan, Kang Ferdi juga dan juga Pak Andreas juga. Jadi banyak sekali ini teman-teman catatan terkait dengan kelembagaan LADI, yang nanti mungkin perlu dikomunikasikan dengan prosesnya Pak Menteri.

Baiklah, selanjutnya kita beri kesempatan kepada Pak Ferdiansyah.

F-P. GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Terima kasih Ibu Ketua.

**Pak Zainudin Amali dan seluruh jajaran yang ada di Kementerian Pemuda Olahraga.
Bapak/Ibu khususnya Anggota Komisi X.**

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Shalom.

Yang pertama dan utamanya tentu senada dengan teman-teman yang terdahulu, selamat dan sukses pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI di Papua, kita *applause* untuk Pak Zainudin Amali. Yang kedua, soal WADA walaupun di dalam paparan relatif sebenarnya sudah tidak ada masalah lagi karena sudah kaitannya sudah terjawab dari paparan yang disampaikan dari halaman 24, 25, 26, 27. Apalagi sudah akan disupervisi oleh JADA ini kan pertanyaannya kapan.

Oleh karena itu pertanyaannya dengan sejumlah paparan tadi di halaman 24, 25, 26, 27 dan juga rencana pembahasan, pertanyaan *timeline*-nya Pak Zainudin. *Timeline* tahapan-tahapan tersebut karena ini kan menyangkut nanti *event-event* internasional selanjutnya. Jadi kami sebagai mitra, jangan sampai mitra kita ini dipermasalahkan tapi juga ini kan tergantung ataupun kita punya korelasi dengan K/L lain, mungkin, tolong saya dikoreksi Pak.

Oleh karena itu dari paparan utama, paparan 26, halaman 26 itu bisa dijawab ataupun diperkirakan Pak Zainudin Amali, ini kan kehendak itu berkaitan dengan kelembagaan. Ini kan juga dalam undang-undang revisi atau mengganti SKN ini menjadi suatu hal yang memang perlu kita dalami karena dua hal, yang memang ada dua hal Ibu Pimpinan, sebenarnya ada tiga, kelembagaan, pendanaan dan arbitrase ini juga harus kita ke depankan. Ini paling tidak gambarannya.

Sehingga yang maksud kami adalah tahapan-tahapan dalam konteks pembenahan LADI yang dilakukan pada misalnya di antaranya di halaman 27, kemudian tahapan-tahapannya dan sebagainya itu yang belum tergambarkan adalah *timeline*-nya Pak, waktunya kapan. Sehingga konsekuensi logis kalau ini misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi, terjadi pengunduran konsekuensi logis terhadap *event* yang akan datang bagaimana, itu yang diantisipasi. Karena ini kan banyak *item*, bukan banyak tapi masih ada beberapa *item* yang memang perlu kita tindak lanjuti Pak Zainudin Amali.

Yang berkaitan dengan PON Pak. Ini dari PON ke PON kami amati dari tahun 1990 sampai sekarang, ternyata kan juga dalam rangka ini inspirasi baru Pak, ide baru. Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, apakah dimungkinkan enggak, tentu kita kaji PON itu tidak di satu provinsi Pak, tapi dua provinsi yang berdekatan saja dengan pembagian cabor yang

proporsional. Sehingga kalau cabornya ada misalnya yang dipertandingkan 33 berarti 17 sama 16 dan sebagainya, termasuk juga nomor-nomornya.

Terakhir ini berkait dengan tadi aset Pak, aset juga kalau memang yang sifatnya peralatan, ini saran Pak Zainudin Amali dan seluruh jajaran Deputy, bisa enggak diberikan kepada dengan tentu persyaratan dan klasifikasi, cabor-cabor yang memang mempunyai harapan-harapan untuk berprestasi di masa yang akan datang. Jadi untuk terutama untuk peralatan ya Pak, kalau untuk yang fisik kan enggak mungkin stadion kita pindahkan ke Kaltim, enggak mungkin tapi kalau peralatan saya rasa dimungkinkan ya Pak Zainudin Amali ya.

Hanya itu saja Ibu, jadi mohon kiranya nanti kita bisa mengagendakan berapa mengenai kelembagaan karena dalam terjawabnya LADI *Insha Allah* juga pintu masuk untuk menyelesaikan kelembagaan di bidang lain, misalnya nanti apakah juga akan muncul tetap BOPI/Badan Olahraga Profesional, apakah kalau kita muncul BSANK. Karena ini banyak perbedaan pendapat ataupun tidak semua karena kan kacamataanya beda-beda Pak Zainudin Amali, karena ada yang mengatakan itu melekat di K/L, tapi di satu sisi enggak bisa juga, masa yang merencanakan, melaksanakan dan mengawasi masa K/L lucu juga. Ini yang juga harus kita cermati lebih lanjut soal kelembagaan.

Itu dahulu Ibu Pimpinan terima kasih, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om shanti, shanti, shanti om.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih dan nanti ada beberapa catatan yang barangkali perlu direspons terkait dengan fasilitas *pasca* PON dan juga aset-aset ya.

Kepada teman-teman dari Fraksi Gerindra ini siapa yang mau terlebih dahulu? Prof. Djohar lah ya.

F-P. GERINDRA (Prof. DR. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi X.

Saudara Menteri dan jajaran.

Ketua KOI.

Ketua LADI.

Pertama ucapkan selamat kepada Menteri Olahraga dan jajarannya telah melaksanakan PON dengan sukses, sukses luar biasa dan telah memecahkan 90 rekor PON dan rekor nasional, ini tidak sangka begitu banyak rekor pecah kita tidak sangka dan ini situasi COVID-19 dan persiapan daerah-daerah juga kita tahu, tapi ini luar biasa. Oleh karena itu kita perlu menjaga ini ya, kita sebentar lagi akan ikut *multi event* dan terus kita jaga, kita kembangkan.

Nah yang jadi masalah yang dikatakan tadi *what's next* ya *Rafter that* kejuaraan ini menjadi apa fasilitas-fasilitas itu, ini yang menjadi masalah besar bagi kita. Oleh karena itu perlu pemikiran khusus untuk itu, jadi jangan terbengkalai seperti yang tempat-tempat lain. Jadi saya mengusulkan barangkali desain stadion sebelah luar desain ada perubahan ringan saja bagaimana bisa jadi tempat pesta, jadi orang pesta di sana, ada ruangan satu hari bisa 5-6 pesta bisa dilaksanakan orang kawin atau apa dan parkirnya sangat luas. Jadi ada *income* untuk *maintenance* dan kita apalagi mungkin ada mungkin kafe atau segala macam.

Karena itu tempat yang dikunjungi di tengah kota lagi, jadi sangat bisnis, barangkali sudah bisa di situ, toko-toko karena bagian luar, bagian dalam tidak kita ganggu karena itu sudah ada ketentuan, bagian luar semua dekorasi bisa kita buat, jadi diarahkan ke sana dan orang akan datang ke Papua itu pasti ingin ke stadionnya, acara apa pun dia ingin ke stadion dahulu, di stadion banyak sekali pilihan-pilihan apa yang mau dikerjakan.

Semuanya sudah sudah okelah ya kita siapkan, kita akan bantu, kalau bisa nanti fakultas olahraganya dikembangkan di sana, semua fasilitas itu internasional, luar biasa. Jadi sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan sepanjang tahun. Seperti ada masalah juga tadi Pak Menteri sudah melaporkan di halaman 6 tadi itu tentang adanya honor-honor yang belum terselesaikan. Jadi melapor kepada kita ada 67 orang juru kamera resmi, itu sudah lengkap semua administrasinya belum diselesaikan.

Oleh panitia dikatakan tunggu semuanya karena relawannya selesai, relawan ribuan orang juga belum selesai, kita harap ini bisa diselesaikan. Jadi laporan Menteri juga dilaporkan ini, masalah honor masih ada ketinggalan administrasinya, hendaknya bisa diselesaikan secepatnya, yang mana yang udah lengkap bisa diselesaikan. Mudah-mudahan dan sekali lagi saya katakan sukses Pak Menteri.

Untuk LADI walaupun mau buang air kecil, nanti ada anggota yang mendengarkan. Tadi saya dengar ada yang mau mengangkat staf ya, betul-betul *very good in English*. Jadi jangan enggak mengerti bahasa nanti surat datang, mereka tidak mengerti dan stafnya hendaknya *full time*, bukan sambilan. Kalau pemimpinnya ya oke, tapi stafnya ini semua *full time*, jadi semua bisa gerak cepat mengerjakan segala sesuatu dan masalah barangkali adalah anggaran. Anggaran ini jadi masalah karena setiap olahraga ini kan harus disimpan.

Kita mengusulkan kalau memungkinkan nanti menteri bisa bicara dengan Pak Presiden, apakah bisa di lembaga mandiri sendiri seperti LIPI itu kan karena olahraga ini kan sepanjang tahun. Sementara itu belum bisa berdiri sendiri, barangkali ada keputusan menteri setiap ada kejuaraan anggarannya masukkan anggaran untuk pemeriksaan ini. Misalnya Kejurnas, anggaran Kejurnas itu masuk biaya untuk pemeriksaan anti doping ini, PON juga masuk biayanya di dalam situ. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional mewajibkan masukkan dalam anggaran itu biaya pemeriksaan doping ini, jadi tidak kewalahan seperti ini kan.

Kemudian tentang hukuman, semua kita menderita, semua kita sakit hati hukuman ini karena ini masalah bangsa, harga diri bangsa. Jadi kita sudah dapat panggilan Pak Okto, Pak Okto ini teman lama ya 20 tahun lalu mengurus tinju profesional di Tenggara, 20 tahun yang lalu, luar biasa Beliau di olahraga. LADI berbaik-baiklah langsung segera kepada WADA-nya dan kemudian NOC dengan IOC, nanti dari situ barangkali dapat hubungan baik.

Kemudian lagi apalagi yang harus dikerjakan oleh kita ini, semua tim mencari siapa pangkal kesalahan ini. Saya khawatir kalau menurut laporan ini, LADI yang lama dapat berita tidak mau berikan kepada LADI yang baru. Saya ingin tanya kepada LADI, penggantian ini kan sudah dilaporkan kepada WADA, sudah ya Pak? Sudah dilaporkan. Artinya sudah dilaporkan kok WADA mengirim berita ataupun permintaan ke pengurus yang sudah dilaporkan sudah diganti. Jadi WADA pun salah mengirimkan berita, permintaan segala macam kepada bukan pengurus lagi. Jadi dua yang kita boleh todong ini, pertama pengurus LADI tidak pengurus lagi dapat berita tidak memberikan kepada pengurus yang baru.

Kemudian WADA mengirim berita kepada yang salah, kepada pengurus yang lama, bukan pengurus yang baru. Jadi apa saja diminta pasti tidak akan diberikan karena dia bukan pengurus lagi, tapi kalau dia minta kepada pengurus baru tentu dia akan dapat. Jadi kita juga berhak komplain kepada WADA, Anda juga salah, jangan salahkan kami, Anda juga salah karena mengirim berita permintaan kepada yang bukan pengurus. Jadi ini barangkali bahan untuk kita minta keringanan.

Terima kasih Pimpinan, mohon maaf.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-P. GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.):

Saya menambahkan sedikit saja Ketua, boleh?

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Elnino dari Gorontalo, singkat saja Ibu Ketua ini sudah waktu tambahan bagi fraksi kami.

Pak Menteri dan juga Ketua KOI, Ketua KONI dan semuanya jajaran kementerian.

Kita memang memberikan *applause* kepada Anda semua, sekali lagi untuk keberhasilan terlaksananya PON dan juga segala yang ada berkaitan dengan PON itu, sekali lagi kami tepuk tangan untuk itu.

Mengenai masalah tentang tidak terkibarnya bendera, sanksi dari WADA dan persoalan lainnya. Kami setelah baca ini dan mendengarkan Bapak-bapak semua memberikan penjelasan, kami berpikir bahwa tidak akan ada satu pun dari Komisi X ini, dari Anggota DPR yang tidak akan *support* Bapak-bapak untuk mengatasi masalah ini. Nanti *Insyah Allah* di sini DPR kan punya fungsi, bukan hanya tiga lagi.

Kita memiliki di samping legislasi kita siap membantu Bapak-bapak untuk mengatasi masalah ini, fungsi *budgeting* kita siap untuk membantu Pak Menteri untuk masalah ini, fungsi representatif juga kita siap membantu Pak Menteri untuk masalah ini, termasuk yang ada di daerah-daerah yang kita wakili dan kita juga punya fungsi diplomasi, Anggota-Anggota DPR dan juga DPR RI yang mungkin berkaitan dengan yang di luar negeri, kita juga siap membantu Bapak-bapak.

Pak Menteri karena dahulu adalah Anggota DPR pasti mengerti apa yang bisa dibantu oleh Anggota DPR untuk Bapak. Kami semua *Insyah Allah* *support* Bapak agar jangan sampai insiden ini terjadi lagi, *Insyah Allah* lahir dan batin Pak Menteri.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kepada Elnino dari Gerindra.

Selanjutnya kita beri kesempatan kepada teman-teman Nasdem Pak Syamsul dan setelah itu siap-siap mungkin Gus An'im dari PKB.

F-P. NASDEM (M. SYAMSUL LUTHFI, S.E.):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi X yang saya hormati.
Pak Menteri, Ketua KOI, dan Ketua LADI beserta segenap jajaran.**

Yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah doping yang menjadi fokus kita dari *World Anti-Doping Agency*, yang mana doping ini kan terjadinya sejak kejuaraan balap sepeda dahulu ya tahun 1998. Kemudian ada deklarasi (suara tidak jelas) 1999 dan penerapannya pada Olimpiade Sydney tahun 2000 yang lalu. Nah setelah berjalannya 21 tahun, 20 tahun

sampai dengan saat ini maka perkembangan yang diterima oleh negara kita terkait dengan sanksi tersebut tentunya menjadi keprihatinan bagi kita semua. Karena walaupun kendala yang di alami oleh semua negara kita berada pada situasi pandemi COVID-19 tapi bukan berarti negara-negara lain tidak siap untuk menerapkan aturan sesuai dengan yang ditentukan oleh WADA tersebut.

Di negara ASEAN seperti Thailand, kemudian Korea Utara juga mendapat sanksi serupa bahkan pada Olimpiade kemarin kan Rusia saja tidak menggunakan namanya, tapi menggunakan Russian Committee Olympic jadi tidak menggunakan nama negara karena mendapat sanksi masalah doping tersebut. Berangkat dari hal tersebut di sinilah pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara semua *stakeholders* dan pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang bergerak di bidang olahraga.

Di mana komandannya adalah Kemenpora, kemudian ada KOI dan KONI, beserta lembaga-lembaga lain. Karena bagaimanapun juga yang namanya lembaga internasional seperti WADA ini tentunya lebih mementingkan integritas, mutu tinggi dan kualitas di dalam melaksanakan kegiatannya. Sehingga sekecil apa pun kesalahan kita yang mana syarat-syarat sekecil apa pun yang belum bisa kita penuhi tentunya pasti menjadi ganjalan hambatan di dalam kita bisa melaksanakan kegiatan olahraga tersebut.

Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menpora beserta Ketua KOI dan KONI, beserta Ketua LADI yang sangat responsif untuk agar masalah ini bisa cepat selesai karena banyak *event-event* internasional yang segera kita laksanakan. Kita sangat khawatir konsekuensi logis dari sanksi ini adalah sangat berat ke depannya apabila tidak segera kita patuhi dan kita laksanakan.

Terutama beberapa waktu yang lalu setelah kita melaksanakan PON XX di Papua, tentunya tes doping ini sangat penting dan itu merupakan bagian dari tes yang harus secara berkala dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi ketentuan dari WADA tersebut. Jadi saya apresiasi dari apa yang disampaikan oleh Ketua KOI tadi, ini adalah suatu langkah maju yang *Insyah Allah* kita sangat berharap masalah ini bisa akan segera selesai.

Kemudian mengenai masalah PON Papua, saya sangat mengapresiasi terutama dari Fraksi Nasdem atas kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga karena di masa situasi pandemi yang sangat sulit dengan segala keterbatasan ruang dan waktu yang kita miliki, tapi Pak Menpora beserta segenap jajaran mampu melaksanakan PON XX di Papua tersebut dengan baik, sukses dari sisi prestasi, sukses dari sisi administrasi, kemudian sukses dari *multiplier effect* yang dimunculkan dengan terlaksananya PON tersebut.

Tapi yang paling penting bagi kita adalah penyelenggaraan tuan rumah PON di dalam setiap 4 tahun sekali tersebut jangan dianggap sebagai ajang untuk pemerataan pembangunan saja. Karena sekarang trennya beberapa provinsi mengajukan tuan rumah menjadi PON dengan harapan dan

keinginan agar dibangun infrastruktur di provinsi tersebut. Tapi yang paling penting bagi kita semua adalah bagaimana ketika infrastruktur olahraga tersebut dibangun *maintenance*-nya seperti apa, jangan sampai kasusnya seperti di Jakabaring, kemudian di Samarinda, kemudian di Riau *venue-venue* yang skala internasional itu hanya digunakan 4 tahun sekali.

Nah ini yang perlu kita pikirkan secara bersama-sama, bagaimana bentuk supervisi dan asistensi dari Kementerian Pemuda Olahraga terhadap *venue-venue* dan sarana olahraga yang ada yang selama ini dibangun ketika dilaksanakan PON di provinsi-provinsi tersebut. Jadi sekali lagi kami dari Nasdem sangat mengapresiasi.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Aduh Menpora menuai banyak apresiasi ya sore ini *alhamdulillah*.

Sekarang kita dengarkan mungkin dari Fraksi PKB Gus An'im, Gus akan memberikan, silakan dan setelah itu dari Fraksi Amanat Nasional ya.

F-PKB (H. AN'IM FALACHUDDIN MAHRUS):

Terima kasih Ketua atas waktunya.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Bapak Menpora beserta jajarannya.

Pertama yang ingin kami sampaikan, kami mengapresiasi kesuksesan PON di Papua. Untuk itu kesuksesan ini supaya bisa dijaga nanti apabila ada selanjutnya diadakan PON di Banda Aceh dan Sumatera Utara ya kalau enggak salah, kelanjutan seperti itu. Saya juga sama dengan Tuan Guru Syamsul Luthfi tadi berpesan bahwa *venue-venue* PON ini agar betul-betul dirawat dan dijaga, jangan sampai menjadi barang yang mangkrak. Apalagi *venue-venue* di Papua tersebut sangat berdekatan dengan talenta-talenta olahragawan, kita banyak potensi-potensi secara fisik ya di Papua ini adalah atlet-atlet berbakat, tinggal dipoles tentang kedisiplinan dan kecerdasan otak itu saja Pak, itu harus diperhatikan.

Kemudian untuk LADI tadi tentang doping, saya sangat-sangat prihatin sekali Pak. Kita ikut menyaksikan kegembiraan kita di Thomas Cup, kita mendapatkan kejuaraan tapi ketika bendera merah putih tidak berkibar, kita sangat mirip miris Pak. Maka dari itu saya berharap ini betul-betul diperhatikan agar prestasi olahraga ini disertai juga membawa harum nama

baik Indonesia sebagai simbol, nama baik adalah bendera bisa berkibar di negara lain.

Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan dan saya berpesan pembinaan atlet Pak. Pembinaan atlet yang ada di daerah-daerah selama ini anggarannya masih sangat terbatas sekali, maka dari itu harusnya kemitraan dengan swasta harus dikoordinasikan dengan baik, dengan otomatis, dengan ada semacam kompensasi ya. Seperti di Kediri mengelola pingpong ini dahulu sampai internasional ya, tapi sekarang karena penggantinya ini mungkin atau enggak tahu kita manajemen di dalam kenapa, ini pembinaan pingpong ini sekarang berhenti Pak.

Apa mungkin kurang ada penghargaan atau perhatian dari pemerintah, atau mungkin manajemennya ganti, atau mungkin pengelolaan di dalam kita enggak tahu. Tapi yang jelas kita sudah membuktikan bahwa bidang-bidang olahraga yang disponsori oleh swasta, yang mana mereka mencari bibit dari sejak dini di daerah-daerah terpencil mencari bibit itu sangat-sangat membantu sekali prestasi olahraga kita. Maka dari itu dukungan pemerintah terhadap kontribusi swasta ini harus tetap dikoordinasikan dan diapresiasi.

Sekian yang bisa kami sampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Gus An'im.

Selanjutnya ini mungkin yang terakhir kepada Pak Mitra, silakan mewakili Fraksi PAN.

F-PAN (MITRA FAKHRUDDIN, MB):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati teman-teman Anggota Komisi X.
Yang sama-sama saya hormati Pak Menteri bersama dengan seluruh jajaran.**

Ketua KONI, Ketua KOI, Ketua LADI.

Seluruh hadirin yang sama-sama berbahagia pada sore hari ini.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagi-lagi apresiasi Ibu karena memang ini capaian yang sangat luar biasa Pak Menteri. Secara personal juga Pak Menteri saya lihat setelah dari Makassar kemarin, langsung terbang ke Papua lagi kalau enggak salah Pak Menteri untuk Peparnas, sangat luar biasa mencurahkan energi, waktunya untuk kepentingan bangsa kita ke depan. Kemudian tentu merasa bangga,

bahagia juga, senang PON Papua ini terlaksana dengan sukses. Saya tidak melihat dari empat sukses itu saja, tapi saya melihat bahwa hadirnya PON, suksesnya PON di Papua ini membawa efek positif baik itu sosial, budaya, ekonomi dan politik. Karena jujur Pak Menteri di tanah Papua juga banyak sanak keluarga kami di sana, dari Bugis, Makassar itu banyak di Papua yang merantau dan mereka merasakan efek dari penyelenggaraan PON ini.

Tentu ini kita harapkan ke depan pelaksanaan-pelaksanaan *event* olahraga itu efeknya bukan hanya sekedar sukses acara saja, tetapi punya dampak positif terhadap masyarakat. Oleh karena itu kemarin ketika ditetapkan Sumut dan Aceh itu sebagai tuan rumah PON berikutnya, *Insyah Allah* ini juga kami pulau Sulawesi kebagian, kebagian jatah *event* ini, karena sudah lama di Sulawesi tidak dilaksanakan PON ya betul. Tentu Ketum RSO juga bagian dari darah Sulawesi punya tanggung jawab.

Terus kemudian apresiasi untuk Ketum RSO, saya panggil Ketum RSO karena senior saya di Hipmi Pimpinan. Jadi saya lihat semangat untuk mengurus persoalan-persoalan yang ada di WADA kemarin dan bahkan di media-media pun saya sudah melihat bahwa WADA telah membuka diri untuk menyelesaikan persoalan ini. Mudah-mudahan secara kelembagaan juga kita akan tetap men-*support* apa yang menjadi langkah-langkah dari Ketua KOI, LADI, dan tentu Kemenpora untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada hari ini.

Mungkin itu saja Pimpinan, terima kasih. Kami dari Fraksi PAN mengucapkan terima kasih telah mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa ini.

Wabillahittauhiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Betul-betul ya kayaknya sore ini banyak sekali ya pujian yang disampaikan ya, luar biasa ya membesarkan hati.

Selanjutnya kita, saya sebelum memberikan kesempatan kepada Menpora dan juga mungkin teman-teman lain menanggapi, mohon izin karena ternyata waktu sudah melampaui kesepakatan kita. Mungkin kita perpanjang 15 menit saja ya teman-teman ya, *Insyah Allah* cukup untuk menanggapi berbagai masukan, catatan dan juga apresiasi yang tadi disampaikan oleh teman-teman anggota. 15 menit perpanjangan waktu.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan kepada.

F-PKS (H. MUSTAFA KAMAL, S.S.):

Izin Pimpinan.

Apa mungkin dari Fraksi PKS menyampaikan sedikit melalui virtual, mohon maaf Mustafa Kamal.

KETUA RAPAT:

Siap-siap, tentu saja. Saya mohon maaf ya tadi mungkin terlewat, ini teman-teman yang virtual. Tadi ada 9 orang ya dari teman-teman yang hadir dan tentunya kita berharap dari PKS juga bisa menyampaikan masukan ataupun tanggapannya.

Silakan Bung Mustafa Kamal.

F-PKS (H. MUSTAFA KAMAL, S.S.):

Terima kasih sekali Ibu, mohon maaf saya virtual

Bapak Menteri yang saya banggakan.

Ketua KOI.

Ketua LADI yang ternyata namanya sama dengan saya.

Pak Kiai Mujib menyebutnya Al-mustofa yang terpilih. Saya kalau di dapil dipanggil Musthofa saya bilang amin karena dipilih terus jadinya Bapak/Ibu sekalian. Saya juga apresiasi pada Pak Menpora atas prestasi yang luar biasa di PON dan PON ini juga bukan hanya menjadi kegembiraan nasional, prestasi olahraganya, perekonomian yang tumbuh tapi juga politik luar negeri kita semakin kokoh. Karena kemudian kita bisa mengabarkan kepada dunia melalui diplomasi olahraga PON yang sifatnya nasional sekalipun bahwa NKRI itu utuh, bahwa Papua itu aman, bahwa ketahanan nasional kita itu kokoh. Jadi saya kira ini sisi yang juga kita perlu bertepuk tangan buat Pak Menteri dan jajaran yang penuh dedikasi dalam PON ini.

Kemudian sedikit catatan saja Pak Menteri, kemarin kita menerima wawancara-wawancara olahraga yang kelihatannya agak kecewa karena perlu pemberdayaan dan ingin dilibatkan lebih banyak pada kegiatan-kegiatan nasional, termasuk di Papua. Sehingga pemberitaan akan lebih maksimal, ini saya perlu sampaikan mungkin Pak Menpora ke depan perlu lebih banyak memberdayakan wawancara-wawancara yang khusus di olahraga ini dan saya juga menyesalkan dari Kominfo kemarin kurang keterpaduan dan kinerjanya dalam menyebarkan informasi *day to day*, detik per detik dari pencapaian olahraga kita di PON. Di daerah-daerah banyak yang terlambat ya, tertunda mendapatkan informasi ini. Saya kira ini juga perlu dievaluasi bagaimana pola komunikasi publik ke depannya.

Kemudian yang kedua, saya juga apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh KOI, oleh LADI untuk mempercepat proses ya penyelesaian masalah kita dengan WADA ini. Tetapi saya juga mohon izin di sini memberikan catatan agar kita juga meneruskan pada proses investigasinya.

Tadi dinyatakan selain proses untuk penyelesaian-penyelesaian administratif, teknis, perbaikan informasi tapi juga investigasi.

Karena ini kalau tidak salah ya perintah presiden ya memang investigasi dan kalau ada investigasi nanti saya kira perlu dilaporkan di sini bagaimana perkembangannya dan tentu ada sanksi ya. Karena kemarin ini bukan peristiwa biasa, tidak dikibarkannya bendera merah putih di Thomas Cup itu merupakan kejadian yang mempertaruhkan kredibilitas bangsa kita di dunia internasional dalam diplomasi olahraga khususnya dan kita perlu betul-betul waspada, jangan sampai ada meskipun kelihatannya teknis, tapi bisa juga sesuatu ini menjadi sabotase terhadap kepentingan nasional kita.

Oleh karena itu perlu dipikirkan tentang sanksinya, karena saya mendengar kemarin dari LADI serah terima jabatan pun tidak ada dari pengurus yang lama bahkan keterlambatan kita memenuhi apa yang diharapkan oleh WADA itu juga dikarenakan *password*-nya tidak diserahkan. Setelah *password*-nya diberikan lalu kemudian bisa terlihat apa saja *pending matters* yang harus kita penuhi. Ya hanya gara-gara waktu apakah tidak ada larangan momentum, ini bagaimana dan siapa yang bisa mempertaruhkan harkat martabat bangsa di dunia internasional dengan tidak menyerahkan *password* hal yang sederhana. Itu apakah kesengajaan atau itikad tertentu ya perlu ditilik dari berbagai aspek termasuk hukum perilaku tersebut.

Kemudian yang terakhir Pak Menteri, belajar dari peristiwa ini tentang doping dan dari LADI ini saya kira ke depan kita harus mengokohkan kelembagaan di seluruh sektor keolahragaan kita ini. Bagaimana kita betul-betul mencapai kelembagaan yang memenuhi standar internasional. Oleh karenanya berbagai perjanjian dan konvensi internasional yang telah kita ratifikasi, saya dengan segala rendah hati apa mungkin Pak Menpora dan jajarannya mengumpulkan semua yang sudah kita ratifikasi itu apa saja, lalu kita lihat apakah sudah cukup itu diatur dalam rancangan Undang-Undang SKN yang sedang kita susun.

Jadi jangan sampai ada yang luput lagi ternyata LADI ini memang pekerjaannya rutin, tidak pernah berhenti ada edukasi, bahkan atlet itu harus dicek bukan pada waktu bertanding saja tapi ada berkala setiap saat, ini lembaga permanen. Tapi ya mohon maaf dengan kejadian ini kita melihat ya kemarin lemah sekali kelembagaannya. Nah ini ke depan ini coba di-*list* lagi apa-apa saja perjanjian konvensi internasional yang telah kita ratifikasi, yang kita perlukan, kita tuangkan turunannya, kita kawal di RUU SKN yang sedang kita bahas dan nanti kita kawal pelaksanaannya di DPR. Kenapa? Karena saya lihat kan di sini harus mandiri, mungkin pemerintah tidak mungkin masuk di dalam kelembagaan tetapi pelaporan keuangan, bagaimana kinerjanya mungkin nanti jadi mitra Komisi X DPR RI yang akan datang, bisa jadi karena pemerintah tidak bisa langsung masuk ke dalam.

Mungkin itu Ibu Pimpinan dan para hadirin yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kiai Mustafa Kamal dan ini komentar yang terakhir walaupun saya melihat ada Ketua Fraksi, Kapoksi dari Partai Amanat Nasional ini hadir ini Ibu Dewi Coryati, jadi tidak berkomentar ya? Namun kehadirannya di sini menunjukkan *support* dan perhatian yang besar kepada dunia olahraga kita. Terima kasih semua ya teman-teman atas berbagai masukan, komentar yang sudah, saya lihat Menpora mencatat dengan cermat itu semuanya teman-teman.

Mungkin kita dengarkan sekarang respons balik dari Beliau dan kami beri waktu kepada Menpora untuk memberikan tanggapannya.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Baik terima kasih Ibu Pimpinan.

Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi X yang terhormat sudah menyampaikan pandangan, apresiasi, kemudian masukan dan juga pertanyaan.

Yang terhormat Bapak Andreas Hugo Pareira, yang terhormat Bapak Ferdiansyah, yang terhormat Bapak Mujib Rohmat, yang terhormat Bapak Elnino, kemudian yang terhormat Profesor Doktor. Djohar Arifin, yang terhormat Bapak Syamsul Luthfi, yang terhormat Bapak An'im Falachuddin Mahrus, yang terhormat Bapak Mustafa Kamal, dan juga yang terhormat Bapak Mitra Fakhruddin. Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi X yang kami hormati.

Bagaimana biasa saya akan menyampaikan respons pokok-pokoknya dan setelah ini akan kami sampaikan secara tertulis. Pertama tentang PON, bagaimana nasib tentang aset *venue venue* yang berstandar internasional yang sudah digunakan pada PON itu dan juga tentang peralatan-peralatan yang sudah digunakan pada saat PON.

Tentang aset ini memang sejak awal dari pengalaman pelaksanaan PON-PON sebelumnya saya sudah menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk mempersiapkan pengelolaannya dan kita bersyukur Pemerintah Provinsi Papua tanggap tentang itu dan mereka sudah menyiapkan satu badan ya, Badan Layanan Umum Daerah yang akan mengelola aset-aset ini yang sebelumnya dalam pelaksanaan PON-PON sebelumnya itu tidak dipersiapkan.

Itu bahkan saya mendapatkan informasi dari Kadispora Papua beberapa waktu yang lalu setelah saya tanyakan sekarang ini mereka sudah mengalokasikan dari APBD Papua sebesar 35 miliar untuk *maintenance* dan yang kedua mereka terbuka bekerja sama dengan pihak swasta sebagaimana yang disarankan oleh Bapak/Ibu Anggota Komisi X yang terhormat. Bahkan

sudah membuat surat perjanjian kerja sama dengan *vendor-vendor* untuk pemeliharaan terutama untuk yang memang membutuhkan hal-hal khusus.

Misalnya di *venue* akuatik, *venue* akuatik adalah *venue* terbaik di Indonesia sekarang ini karena dia *indoor* dengan pencahayaan yang bagus. Nah tidak mungkin itu dirawat oleh ASN yang ada di sana atau pihak-pihak lain, akhirnya langsung dikerjakan samakan dengan *vendor*. Demikian juga di tempat-tempat lain misalnya Lukas Enembe Stadium atau Stadion Lukas Enembe pemeliharaan rumput dan lain sebagainya itu juga langsung dikerjakan samakan dengan penyedia pada awalnya. Ini saya kira langkah-langkah yang baik dari Pemerintah Provinsi Papua yang tidak dilakukan pada saat-saat sebelumnya.

Nah kami tentu tetap akan men-supervisi mereka dan juga akan mendorong cabor-cabor untuk melakukan kegiatan sehingga ada kegiatan sebab kalau dia hanya dipelihara saja itu tidak mungkin untuk bisa membiayai. Sama seperti Kompleks GBK ini, di samping kompleks olahraga ada juga kompleks-kompleks komersial. Nah tadi Prof. Djohar Arifin juga sudah menyarankan supaya di lahan-lahan yang masih memungkinkan itu akan dibangun dan sesuai dengan perencanaan dari Pemerintah Provinsi Papua mereka sudah menyampaikan dan terbuka kepada pihak swasta yang ingin bekerja sama dengan pihak Pemprov.

Dengan demikian maka suatu saat nanti pemeliharaan aset-aset atau *venue-venue* yang ada ini tidak lagi menjadi beban APBD, dia akan terlepas dan dia sudah bisa membiayai dirinya sendiri bahkan mungkin menghasilkan pemasukan untuk PAD/pendapatan asli daerah dari situ. Tapi sementara Pemprov sudah menyiapkan BLUD dan sudah dianggarkan untuk yang pertama ini saya mendapatkan konfirmasi 35 miliar dari APBD. Tapi mereka juga sama pemikirannya dengan kita tidak mungkin mengandalkan APBD secara terus menerus.

Kemudian untuk peralatan yang disiapkan dari Kemenpora itu sudah dihibahkan ke pemerintah provinsi tentu akan digunakan untuk pembinaan di sana dan nanti bagaimana pemanfaatannya oleh cabor-cabor yang ada di sana tentu itu menjadi urusan internal. Kami juga mendapatkan informasi dari Gubernur Papua pada saat pembukaan Peparnas yang lalu, Beliau merencanakan tahun depan akan ada Pacific Games. Jadi akan mengundang negara-negara Pasifik ya.

Yang sekaligus Beliau sampaikan “saya akan melakukan diplomasi olahraga, mereka boleh lihat inilah kondisi Papua yang dibangun dan di”, memang benar-benar diurus oleh pemerintah pusat. Itu langkah-langkah yang akan dilakukan untuk pemeliharaan *venue-venue* yang ada tapi tetap kita akan supervisi. Apalagi di dalam Desain Besar Olahraga Nasional, Perpres Nomor 86 kita Papua itu menjadi salah satu sentra pembinaan talenta-talenta muda kita sehingga ini bisa kita sinergikan.

Kemudian tentang kewajiban-kewajiban panitia yang belum terselesaikan juga kami mengingatkan kepada Panitia Besar PON untuk

segera menyelesaikan. Memang waktu itu mereka beralasan bahwa “kita harus hati-hati” hati-hati tentang administrasi sebab kita tidak mau terulang kembali yang salah bayar-salah bayar dan sempat muncul akhirnya orang menagih tanah dan lain sebagainya bahkan beritanya ada pemalangan dan sebagainya. Ternyata itu sudah pernah diselesaikan tetapi muncul lagi pihak lain yang mengaku mereka yang lebih berhak.

Oleh karena itu panitia ini penjelasannya kepada kami ya, bahwa mereka penuh kehati-hatian. Misalnya waktu itu ada sopir, sopir ini diminta identitasnya dan mana absennya, Anda benar enggak bekerja, begitu juga relawan. Nah mungkin dengan teman-teman media makanya tadi saya sampaikan pada Ibu Ketua saya akan ini kan nanti dini hari saya kembali ke Papua, besok pagi saya akan panggil panitia besarnya untuk menanyakan ini bagaimana tentang kewajiban-kewajiban yang belum bisa diselesaikan.

Selanjutnya tentang publikasi, jadi PB PON itu sebenarnya juga sudah bekerja sama dengan pihak media bahkan KONI yang menjadi Panwasra / panitia pengawas dan pengarah pertandingan juga kerja samanya dengan PWI. Karena saya dua kali menjadi narasumber jadi ada *media center* juga yang disiapkan di Jakarta bila kantor media itu tidak sempat mengirimkan maka bisa mengambil berita dari situ. Bahkan di sana juga disiapkan tentang distribusi berita kepada media-media. Pak Gatot apa namanya?

TENAGA AHLI MENTERI KEMENPORA RI (Drs. GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO, M.B.A.):

Media center Pak.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Bukan, ini nya.

TENAGA AHLI MENTERI KEMENPORA RI (Drs. GATOT SULISTIANTORO DEWA BROTO, M.B.A.):

National broadcasting center.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

National broadcasting, jadi memang itu disiapkan sehingga semua media bisa mendapatkan pemberitaan-pemberitaan dari *national broadcasting* itu dan saya sudah berkunjung ke situ bahkan lengkap secara terus-menerus ada videonya, ada itu dan mereka berpengalaman waktu Asian Games kalau tidak salah dengan Asian Para Games juga. Jadi memang tertata sih tapi kalau memang ada permintaan seperti itu nanti kita akan menjadi catatan kita untuk waktu yang akan datang.

Selanjutnya tentang apa yang juga kita lakukan, yang kedua adalah tentang sanksi WADA terhadap LADI tadi sudah dijelaskan oleh Pak Raja Sapta Oktohari sebagai ketua tim percepatan dan investigasi. Jadi memang di

dalam pembentukan gugus tugas ada dua tugasnya, sekali lagi saya ulangi yang pertama adalah akselerasi penyelesaian masalah-masalah antara LADI dan WADA dan mempercepat pencabutan sanksi. Kita konsentrasi ke situ, setelah itu baru kemudian investigasi.

Sebab kita tidak ingin tadi juga Pak Okto sudah sampaikan kalau kita jalankan bersamaan ini bisa terganggu, sebab kan kita belum tahu mana pihak yang terlibat dan lain sebagainya. Tetapi kita konsentrasi dahulu dan sesuai dengan arahan Pak Presiden ada tiga arahan Pak Presiden pada saya waktu itu di rapat kabinet Beliau menyampaikan, penuhi semua permintaan WADA dan perbaiki komunikasi, yang kedua adalah investigasi, dan yang ketiga umumkan hasil investigasi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.

Itu arahan Bapak Presiden pada kami dan tadi sudah, waktu itu sejak awal kami sudah sepakat dengan Pak Okto dan teman-teman di tim dan dengan LADI juga bahwa kita dudukkan untuk mempercepat penyelesaian urusan-urusan LADI ke WADA sehingga sanksi bisa cepat dicabut. Nah setelah itu tentu baru kita akan lakukan investigasi, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan investigasi oleh Pak Okto sudah dilakukan tetapi tentu Beliau belum mau mengumumkan sekarang, Beliau sudah lakukan inventarisasi kira-kira pihak mana yang terlibat, pihak mana yang terkait, kemudian kenapa ini terhambat dan sebagainya. Tetapi sekarang ini masih menjadi konsumsi dari tim.

Posisi kami, posisi pemerintah apa pun yang direkomendasikan oleh tim *Insya Allah* saya akan jalankan rekomendasi itu. Jadi kita akan umumkan dan kita jalankan rekomendasi itu. Nah percepatan-percepatan komunikasi sebagaimana yang sudah dilaporkan oleh Pak Okto bahwa sudah terjadi relaksasi yang tadinya tegang-tegang sekarang sudah enak, bahkan rapat ini sekarang hampir tiap hari. Tadi pagi ya Pak Dokter Mus ya, juga antara WADA dan LADI, kemudian ada SIRADO, di situ ada JADA. Jadi ini sudah terjadi mudah-mudahan kalau ditanya tentang *timeline*, kalau dilihat dari surat yang tanggal 7 itu sampai dengan 1 tahun, tetapi tadi dari upaya-upaya yang kita lakukan Pak Ketua Tim ambil yang moderatnya kira 6 bulan tetapi kita akan akselerasi lagi, siapa tahu bisa lebih cepat.

Nah bagaimana mana tentang pertandingan-pertandingan yang ada, tentu pertama tentang sanksi yang kita dapatkan berbeda dengan Rusia ya, Rusia itu segala-galanya sudah enggak boleh berbau Rusia, tidak boleh pakai negara, tidak boleh bendera, tidak boleh lagu. Nah kita masih sebatas bendera, negara masih boleh, lagu masih diperdengarkan. Kemudian kejuaraan-kejuaraan yang dalam waktu dekat nanti Pak Okto ditambahkan ya. Informasi yang kami dapatkan misalnya kegiatan yang di NTB tentang *World Super Bike* itu tetap masih bisa jalan, kemudian Badminton *series* yang ada tiga itu di Bali juga itu masih bisa jalan, tadi Pak Okto sudah menyampaikan dan juga kegiatan-kegiatan lain yang kita ikuti masih memungkinkan. Nah memang sekarang masalah yang harus segera diselesaikan memenuhi semua apa yang diminta itu.

Selain itu juga kita akan konsisten dengan apa yang sudah dikomitmenkan tentu pemerintah dalam posisi memberikan dukungan yang di depan tetap Pak Dokter Musthofa dan teman-teman di LADI, untuk mereformasi LADI, untuk membuat LADI menjadi satu lembaga yang independen dan profesional, kemudian LADI punya pendanaan tersendiri dia tidak tergantung lagi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan hal-hal lain yang diminta untuk diperbaiki oleh WADA. Itu kita akan lakukan segera bersamaan dengan upaya-upaya pemenuhan apa yang tadi disampaikan.

Misalnya sisa TDP yang 200 dari Peparnas ya Dokter ya? Kemudian tes doping yang non kejuaraan, jadi Bapak/Ibu saya mau mengulangi lagi tes doping ini ada dua, satu yang dalam rangka kejuaraan, yang kedua adalah saat tidak ada kejuaraan. Nah ini dua-duanya yang 120 non kejuaraan, yang 200 dalam posisi kejuaraan itu di Peparnas maksudnya, itu segera akan dipenuhi bahkan tadi laporannya sudah 60% yang Peparnas ya dan Pak Ketua LADI, Dokter Mus tadi sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa diusahakan akhir November ini terpenuhi semuanya. Nah mudah-mudahan setelah itu tidak ada lagi apa yang diminta begitu loh. Karena ini kita menanyakan semuanya, apalagi, apalagi, apalagi, supaya tidak ada tunggakan lah kira-kira begitu yang harus kita selesaikan.

Jadi itu Ibu Ketua secara singkat respons kami. Terima kasih atas perhatiannya.

KETUA RAPAT:

Luar biasa ya, saya kira sangat lengkap responsnya kita berikan deh semangat *applause* untuk semuanya dan izinkan dalam beberapa menit terakhir kami membacakan laporan singkat. Laporannya memang singkat ya karena cukup jelas ini Keputusan dan kesimpulannya.

1. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Kemenpora Republik Indonesia, PB PON XX Papua dan seluruh pemangku kepentingan olahraga atas sukses yang telah diraih dalam PON XX Tahun 2021 di Papua dengan catatan antara lain agar:
 - a. Dapat memperoleh sukses administrasi dan akuntabilitas anggaran dan dapat mempertahankannya pada penyelenggaraan *multievent* berikutnya.
 - b. Pemeliharaan dan pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana olahraga *pasca* PON Papua dapat dilakukan secara efektif dan maksimal.
2. Terkait penyelenggaraan Peparnas XVI Tahun 2021 di Papua, Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI dan Panitia Besar Peparnas XVI untuk dapat mencapai sukses yang ditargetkan yaitu sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, sukses administrasi, dan juga sukses regenerasi.
3. Terkait sanksi WADA kepada LADI, Komisi X DPR RI menyampaikan catatan sebagai berikut:

- a. Mengapresiasi langkah Menpora RI, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) yang telah membentuk tim akselerasi dan investigasi dan telah melakukan percepatan penyelesaian sanksi WADA.
- b. Mendesak kepengurusan LADI untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan memperbaiki manajemen internal agar permasalahan seperti sanksi WADA tidak terulang kembali.
- c. Revisi tentang nomenklatur anti-doping dan organisasi anti-doping akan dicantumkan dalam revisi Undang-Undang SKN/Sistem Keolahragaan Nasional sebagai konsekuensi dari *The International Convention Against Doping In Sport* yang telah diratifikasi melalui Perpres Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan *International Convention against doping In Sport*.

Nah cukup ya walaupun singkat tapi sangat jelas poin-poin kesimpulan kita pada sore hari ini. Teman-teman semuanya terima kasih, Teh Dewi semuanya atas masukan-masukannya dan juga kepada teman-teman mitra dari Kemenpora Republik Indonesia beserta seluruh jajaran. Apakah ada masukan ataupun koreksi Pak? Cukup?

F-P. GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ibu sebelum ke Menpora Ibu.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-P. GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ini saya rasa sudah cukup tinggal ditambahkan jawaban tertulis mau disampaikan kapan begitu saja.

KETUA RAPAT:

Oh iya tadi Pak Menpora menyampaikan ya karena walaupun tadi sudah cukup spesifik ya detail sekali pada per orang responsnya tapi tidak ada salahnya kita menunggu ya mungkin dalam waktu satu minggu cukup? Silakan teman-teman TA tolong ditulis untuk mendorong Kemenpora RI memberikan respons tertulis atau menyampaikan jawaban tertulis paling lambat tanggal? Satu minggu lah dari sekarang, kan sekarang tanggal? Setuju Pak Menteri ya?

Baik demikian tadi kita bacakan konsep keputusan Raker pada hari ini dan semua sudah setuju, apakah dengan demikian saya sudah bisa mengetuk ya keputusan/kesimpulan rapat hari ini ya?

(RAPAT: SETUJU)

Iya sebelum kita tutup secara resmi kami persilakan kepada Saudara Menpora Republik Indonesia mungkin menyampaikan sepatah, dua patah kata akhir, kami persilakan.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Ya terima kasih.

F-P. GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.):

Interupsi sebentar Pimpinan.

Ini salah tulis mungkin, seharusnya ditulis, di-state di situ secara tertulis jangan lagi kita undang lagi nanti.

KETUA RAPAT:

Jawaban tertulis.

F-P. GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si.):

Tertulis, jawaban tertulis. Terima kasih, nanti datang lagi cuma beda bahas ini lagi.

KETUA RAPAT:

Ya oke.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Baik terima kasih.

Ibu Ketua, Bapak/Ibu Anggota Komisi X yang terhormat.

Saya menyampaikan juga apresiasi dan rasa bangga kami menjadi mitra dari Komisi X DPR RI yang selama ini memberikan dukungan yang luar biasa dan juga berbagai hal yang juga kami butuhkan selalu diberi *support* oleh Komisi X DPR RI.

Tadi ada yang tertinggal saya perlu sampaikan pertanyaan tentang apakah selanjutnya memungkinkan PON itu akan dilaksanakan di dua tempat memang PP-nya sudah diubah. Kalau yang tadinya cuma ada satu provinsi dengan PP Nomor 7 Tahun 2020 perubahan dari PP Nomor 17 Tahun 2007 sekarang sudah memungkinkan dua. Nah dengan dua provinsi yang berdekatan bisa jadi mempercepat semua provinsi mendapatkan bagian. Sebab kalau satu, satu, satu, satu maka itu bisa dibayangkan 100 tahun lagi bisa baru dapat giliran, 34 kali 4 kan sudah berapa itu 100 tahun.

Maka bagi Bapak dan Ibu perwakilan dari dapil-dapil mulai sekarang menyiapkan melihat kira-kira harus bermitra dengan siapa, harus bermitra

dengan yang terdekat. Jadi peraturan pemerintah itu juga memungkinkan, tetapi ini juga tergantung negosiasi. Misalnya NTB bisa memilih NTT, bisa memilih Bali, tergantung nyamannya dengan provinsi mana karena kita tidak akan memaksakan, tetapi tidak boleh jauh.

KETUA RAPAT:

Jadi Pak Syamsul sama Pak Andreas harus dekat-dekat ini.

MENPORA RI (Dr. H. ZAINUDIN AMALI, S.E., M.Si.):

Jadi itu sudah difasilitasi dan pada saat PON yang kemarin beberapa pemerintah daerah juga sudah mendatangi kami, saya sampaikan hal yang seperti itu. Itu Ibu Ketua sebagai tambahan penjelasan dan terima kasih kepada Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau kalau bahasa di IOC internasional adalah Presiden *National Olympic Committee*, Pak Raja Sapta Oktohari dan kepada Ketua Umum LADI Dokter Musthofa, Wakil Ketua Umum Dokter Rheza dan Dokter Dessy yang ada di Papua yang sedang mengawal doping Peparnas dan juga kepada teman-teman saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan Peparnas akan sukses sama dengan PON, dan nanti kalau sudah lengkap urusan administrasi saya akan melapor kembali ke Komisi X mitra yang sangat membanggakan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih.

Oke dengan berakhirnya kata akhir Menpora RI selesai seluruh acara Raker kita pada hari ini. Selamat jalan ya kepada Menpora dan juga Ketua LADI dan terima kasih kepada Presiden NOC, juga seluruh jajaran dan teman-teman yang hadir di sini. Pak Jonni, Pak Raden Isnanta, Pak Gatot semuanya, Ibu Yuni.

Kami tutup rapat kerja pada hari ini dengan mengucapkan *hamdalah* dan terima kasih kepada seluruh Anggota DPR RI yang terhormat dan hadirin yang sudah dengan setia mengikuti Raker ini dengan tertib dan hikmat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL WIB)

JAKARTA, 11 NOVEMBER 2021

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**DADANG PRAYITNA, S.IP, M.H.
NIP. 196708061990031003**